

**UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)
SEBAGAI SARANA PENANGGULANGAN
KORUPSI DI INDONESIA**



T E S I S

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :
Athilda Henriete Sahetapy
B4A.096.002

Pembimbing :
Prof. Dr. H. Loebby Loqman, S.H.

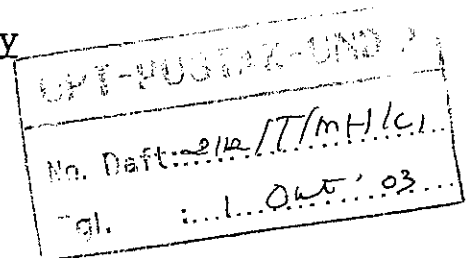
PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002

UPT-PUSTAKA UNDIP

**UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)
SEBAGAI SARANA PENANGGULANGAN
KORUPSI DI INDONESIA**

Disusun Oleh :

Athilda Henriete Sahetapy
B4A.096.002



Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal : 08 April 2002

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Loebby Loqman, S.H.

Mengetahui,

Ketua Program Magister Ilmu Hukum,



Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H.

Kata Pengantar

Segala aktivitas dan proses studi pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang telah selesai dengan rampungnya penulisan tesis ini, dengan judul : **UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) SEBAGAI SARANA PENANGGULANGAN KORUPSI DI INDONESIA** sebagai syarat akhir studi guna dipertahankan dalam sidang.

Keberhasilan ini tentu didukung oleh peran serta berbagai pihak yang selama ini telah memberikan ilmu, dorongan, bantuan dan kerjasama yang baik.

Atas kesempatan yang indah ini, pertama-tama penulis ingin bersukur atas anugerah Allah untuk terselesaikannya pendidikan dan tesis ini.

Dengan ini pula, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Diponegoro, yang dengan kebijaksanaannya memungkinkan penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang (S2) di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro, sejak Tahun Ajaran 1996/1997 hingga saat ini.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. atas berbagai kesempatan dan fasilitas pendidikan, serta dorongan dan

perhatiannya selama penulis belajar di Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro.

3. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro, yang berkenan memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperdalam ilmu hukum, khususnya pada program Kajian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.
4. Yang sangat dihormati para Guru Besar pada Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro, atas berbagai pengetahuan hukum sebagai ilmu beserta pemahamannya secara teoritik-akademik.

Ucapan terima kasih yang mendalam diberikan kepada Prof. Dr. H. Loebby Loqman, S.H. atas bantuan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing tesis ini sampai selesai.

Kepada seluruh teman-teman Magister Ilmu Hukum Angkatan XV, penulis menyampaikan terima kasih atas dukungan, perhatian dan kerjasama yang sangat menyenangkan dan mengasyikan selama ini.

Secara khusus, penulis ingin mempersembahkan keberhasilan ini untuk yang tersayang Papa dan Mama. Tanpa dukungan, nasehat, motivasi dan bantuan mereka, tesis ini mungkin tidak dapat terselesaikan.

Untuk Ina, Mas Eky, Laura, Kezia, dan Yosua, terima kasih yang tak terhingga atas ketulusan perhatian dan dorongan kalian selama ini

Bagi Lolly tercinta, terima kasih yang tulus untuk perjuangan dan pengorbananmu, serta banyaknya waktu yang tersita dalam masa studi ini.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memenuhi harapan siapa saja yang membacanya dan kiranya bermanfaat untuk Alma Mater.

Semarang, Akhir Februari 2002
Penulis,

Athilda H. Sahetapy
Nim. B4A.096.002

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tinjauan Pustaka	13
D. Tujuan Penelitian	20
E. Kontribusi Penelitian	23
F. Metodologi Penelitian	24

BAB II : KERANGKA TEORITIS

A. Pemahaman tentang Money Laundering	28
B. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	43
C. Problematik Korupsi di Indonesia	65
D. Hubungan Money Laundering dan Korupsi	77

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemberantasan Money Laundering di Indonesia	82
B. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Salah Satu Instrumen Penanggulangan Korupsi	104
C. Money Laundering Sebagai Lex Specialis Dalam Sistem Peradilan Pidana	115

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	124
B. Rekomendasi	126

DAFTAR PUSTAKA

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latarbelakang Masalah

Berbagai problematik di bidang hukum yang menyangkut kejahatan semakin meminta perhatian seiring dengan makin cepatnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi di abad 21 ini. Perkembangan secara berkelanjutan serta hubungan perekonomian internasional semakin berkembang dan maju dengan pesat sehingga perubahan yang terjadi memberikan dampak terhadap ruang lingkup kejahatan. Kejahatan demi kejahatan yang terjadi mengalami bukan saja perluasan terhadap makna, tetapi juga bentuk dan modus operandinya kejahatan makin bertambah canggih.

Oleh sebab itu diperlukan kesiapan Pemerintah Indonesia secara khusus untuk menghadapi pelbagai bentuk masalah kejahatan yang timbul akhir-akhir ini. Kejahatan-kejahatan berdimensi baru seringkali timbul tanpa disadari seperti kejahatan pencucian uang yang ketentuan undang-undangnya baru saja diundangkan, yang mungkin lima dekade yang lalu belum dibicarakan secara luas di Indonesia. Kejahatan pencucian uang ini semakin lama semakin canggih dalam pengoperasiannya dan bentuknya sehingga acapkali mengundang diskursus yang menarik dan hangat di antara

para pakar, baik dari kalangan aparat penegak hukum, birokrasi, maupun dari kalangan para teorisi dari dunia kampus, untuk mencari solusi pemecahannya. Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini seperti yang telah disinggung di atas dan, yang masih hangat dibicarakan di media pers dan para aparat penegak hukum dan menarik serta perlu diaktualisasikan atau disosialisasikan adalah kejahatan MONEY LAUNDERING atau lazim disebut sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang.

Apakah sesungguhnya kejahatan "money laundering" itu? Apakah itu berarti uang harus "dicucikan" ? Kalau itu suatu penggunaan metafora, instrumen-instrumen apa saja yang digunakan dalam proses pencucian uang. Mengapa "money laundering" dewasa ini diperkirakan oleh sementara kalangan, terutama dari pihak penegakan hukum sudah banyak dilakukan? Bagaimana sebenarnya mekanisme "money laundering" itu? Apakah ada kaitan "money laundering" dengan tindak pidana korupsi? Mengapa Pemerintah Indonesia begitu sulit untuk mencari dan memberantas pelaku tindak pidana pencucian uang ini? Apakah memang tindak pidana "money laundering" itu begitu sulit untuk ditindak ? Dan mungkin masih banyak pertanyaan lain yang dapat diajukan bertalian dengan "money laundering" ini.

"Money laundering" acapkali dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pemutihan uang atau pencucian uang. Secara

ringkas “money laundering” dapat digambarkan sebagai suatu proses perubahan keuntungan dari kegiatan yang melawan hukum menjadi aset keuangan yang terlihat seolah-olah berasal dari sumber yang sah.¹

“Money laundering” ini merupakan masalah penting, karena tidak saja menyangkut peredaran sejumlah besar uang (yang haram). Keterkaitannya dengan dunia bisnis yang acapkali bersifat ilegal dan secara langsung memasuki dunia perekonomian. “Money laundering” ini menarik terutama karena modus operandi dan konsekuensi serta implikasinya acapkali melewati batas-batas suatu negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masalah “money laundering” sudah merupakan bukan saja suatu masalah transnasional melainkan juga masalah internasional. Hal ini dikarenakan lalu lintas penempatan uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan ekonomi ini melintasi antar negara melalui proses perbankan maupun sarana modernisasi lainnya yang sudah sampai pada tingkat yang menggelisahkan. Hal yang terakhir ini dapat dimengerti dan difahami, mengingat hasil dari praktek “money laundering” lazimnya berupa uang haram yang biasanya dalam jumlah yang sangat besar yang diperoleh dari korupsi, perdagangan gelap, seperti dalam transaksi narkotik, hasil penjualan barang-barang ilegal ataupun uang haram yang diperoleh dari hasil tindak kejahatan lainnya.

¹ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Jakarta, Maret 1999, hal. 471.

Masalah “money laundering” ini sebetulnya sudah sangat lama dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan berskala nasional maupun internasional. Sebagai sebuah contoh dapat dikemukakan dalam pertemuan Ekonomi Tingkat Tinggi tahunan ke 15 dari 7 negara industri utama di Paris bulan Juli 1989. Demikian pula dalam seminar Kejahatan Ekonomi di bidang Perbankan di Jakarta pada bulan Januari 1989, Ministerial Meeting on “the Creation of an Effective United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme” di Paris 1991, Indonesia - Unafei Joint Seminar di Jakarta bulan Januari 1992. Selain itu telah dibicarakan pula dalam The 5th International Anti Corruption Conference di Amsterdam pada awal Maret 1992, dan dalam Sidang I UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice di Wina tahun 1992. Tentu masih ada lagi pertemuan-pertemuan lain dalam skala nasional terutama dalam era milenium ketiga ini. Jadi pada hakekatnya masyarakat dunia mengajak dan menginginkan Indonesia untuk ikut juga memberikan kepedulian terhadap usaha internasional dalam rangka memberantas dan mengatasi kejahatan “money laundering”.

Kalau diperhatikan perkembangan yang terjadi di luar negeri bertalian dengan problematik pencucian uang, maka di luar negeri hal tersebut telah mendapat perhatian yang cukup serius. Dalam hubungan itu “money laundering” lebih

banyak dikaitkan terutama dengan lalu lintas uang bertalian dengan kejahatan narkotika.

Di Indonesia, terlepas dari kejahatan narkotika yang menurut media massa akhir-akhir ini mulai marak, kejahatan “money laundering” dapat dikaitkan dengan beberapa permasalahan melawan hukum, misalnya seperti tindak pidana korupsi. Apalagi masalah korupsi yang saat ini dipandang sudah sangat parah dan memang menjadi agenda utama pemerintahan reformasi dewasa ini, dalam rangka mengembalikan kepercayaan dari masyarakat terhadap Pemerintah.

Sebagaimana sudah menjadi rahasia umum, masalah korupsi di Indonesia sudah mencapai tahap atau tingkat yang paling parah. Korupsi secara praxis sudah merasuk dalam setiap sendi kehidupan masyarakat di negara kita ini. Apalagi Undang-Undang Korupsi yang lalu yaitu UU Nomor 31 Tahun 1999 oleh sementara wacana sebagaimana diberitakan oleh media massa tampaknya tidak begitu dapat diharapkan untuk menjerat para koruptor dari masa yang lalu. Hal ini dapat dilihat dengan diajukannya amandemen terhadap Undang-Undang tersebut terutama yang menyangkut pasal aturan peralihan kepada Dewan Perwakilan Rakyat R.I yang kemudian menyusun dan menyempurnakannya sehingga sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oleh sebab itu, ketentuan tentang pencucian uang ini kalau

ditangani dengan baik, diharapkan dapat berdampak positif dalam rangka penanggulangan korupsi di Indonesia.

Yang menjadi pertanyaan yaitu, mengapa pemerintah dan aparat penegak hukum serta badan legislatif yang terhormat di pusat seolah-olah belum juga menaruh perhatian yang mendesak terhadap pelaksanaan masalah “money laundering”. Ataukah memang ada faktor lain sehingga pelaksanaan undang-undang “money laundering” sampai saat ini belum juga direalisasikan, dengan dibentuknya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Memang hal ini masih sulit untuk ditemukan jawabannya secara meyakinkan karena data dan fakta belum ataupun kalau ada, sangat sulit untuk dapat diperoleh, sehingga dengan demikian sangatlah sulit diperoleh dan dibahas. Dengan perkataan lain, sangatlah musykil atau sulit untuk mengetahui argumentasi dan pola pikir, baik dari para wakil rakyat dalam DPR – RI maupun dari pihak eksekutif *casu quo* aparat penegak hukum. Tetapi, bila disimak pemberitaan media cetak tentang kekayaan yang kini dapat dijadikan objek pembongkaran korupsi, mungkin hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu indikasi, betapa penguasa pada waktu yang lampau, mungkin tidak begitu berkenan untuk melaksanakan dan memberantas problematik pencucian uang ini dalam suatu bentuk perundangan.

Walaupun kejahatan “money laundering” ini belum begitu mencuat dan tampak secara nyata atau kasat mata di

Indonesia, namun Indonesia menurut sementara wacana dapat saja menjadi lahan yang subur atau daerah yang produktif bagi berkembangnya praktek-praktek "money laundering". Hal tersebut bukanlah mustahil karena selain masalah korupsi sudah mencapai tahap yang parah, diperkirakan juga ada sebab-sebab lainnya. Salah satu contoh, karena Indonesia menganut sistem devisa bebas yang tidak membatasi lalu lintas devisa, baik itu dari luar negeri yang masuk ke Indonesia atau dari Indonesia ke luar negeri. Perkiraan tersebut di atas didasarkan atas adanya Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1992 yang pada intinya memberlakukan asas kebebasan devisa untuk menarik minat investor asing dalam rangka menanamkan modalnya di Indonesia. Asas kebebasan devisa ini tidak membedakan sumber-sumber devisa, apakah devisa itu diperoleh dari sumber ekspor, atau sumber-sumber lainnya, seperti transfer uang yang biasanya dapat digunakan sebagai salah satu alat "money laundering". Jadi dengan memberlakukan devisa bebas ini, jelas sekali dapat memberikan peluang dan kesempatan bagi berkembangnya praktek "money laundering" di Indonesia, kecuali kalau untuk itu diberlakukan syarat-syarat pembatasan, misalnya ketentuan perundang-undangan yang menyangkut "money laundering" dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsekuen oleh aparat penegak hukum.

Berbicara tentang “money laundering”, selain dilihat dari sudut pandang pencegahan dan pemberantasan korupsi, mau tidak mau harus disinggung sedikit, walaupun tidak secara detail, sampai seberapa jauh peranan bank bertalian dengan “money laundering” dan korupsi. Perlu disadari bilamana peraturan tentang “money laundering” benar-benar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka jelas hal itu akan bertalian dengan kerahasiaan bank. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perbankan, yang tampak bahwa fungsi utama perbankan adalah sebagai badan yang ditugaskan untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Simorangkir dalam mendefinisikan fungsi bank mengemukakan sebagai berikut :

Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan bank dengan modal sendiri atau dengan dana-dana lain yang dipercayakan pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.²

Dari definisi yang dikemukakan Simorangkir tampak bahwa bank selain mempunyai fungsi penghimpun dan penyalur dana masyarakat, juga mempunyai fungsi pemberian jasa-

² O.P. Simorangkir, Kamus Perbankan, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hal. 33.

jasa dalam bidang lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perbankan, yang di dalamnya secara khusus mengatur mengenai kerahasiaan bank, dirumuskan dalam Pasal 40 sebagai berikut :

Ayat 1 :

Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41 A, pasal 42, pasal 43, pasal 44 dan pasal 44 A.

Ayat 2 :

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

Tentu saja bank tidak akan begitu saja mau membuka dan mengungkapkan kerahasiaan keuangan para nasabahnya. Hal ini dapat dimengerti dan difahami, oleh karena bank selain adalah suatu institusi yang beroperasi berdasarkan kepercayaan, juga menawarkan jasa-jasa baik untuk menyimpan rahasia keuangan para nasabahnya. Jika sekali saja bank tidak dapat dipercayai lagi oleh para nasabahnya karena mengungkapkan kerahasiaan keuangan nasabahnya, maka bank itu dengan sendirinya, cepat atau lambat akan gulung tikar.

Rahasia bank ini bernilai normatif dalam bentuk hukum positif yang bersifat memaksa. Sifat memaksa

ternyata dari perkataan “wajib” yang terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sebagaimana yang sudah disebutkan di atas. Dasar dari kewajiban bank di sini adalah undang-undang atau hukum positif. Pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank bukan saja sekedar pelanggaran perdata (civil violation), tetapi juga dianggap sebagai pelanggaran pidana (criminal violation).³

Ketentuan-ketentuan seperti inilah yang lazimnya dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku “money laundering”. Dengan adanya kerahasiaan bank yang demikian, maka bank tidak saja dapat menghimpun dana legal dari masyarakat, tetapi juga dapat menarik dana-dana illegal dari siapa saja, termasuk terutama dari perusahaan-perusahaan besar yang terlibat dalam “money laundering”. Oleh karena itu undang-undang yang bertalian dengan pencucian uang sangat penting bagi Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang No. 15 Tahun 2002 ini, mau tidak mau, pihak bank tidak dapat lagi melindungi para nasabahnya yang terlibat atau menjalankan “money laundering” sehingga suka atau tidak suka bank harus turut bekerja sama dengan lembaga yang ditugaskan untuk menangani “money laundering”.

Itu berarti, lembaga yang akan menangani problematik pencucian uang ini, yaitu PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang tercantum dalam Bab V

³ Yahya Harahap, Varia Peradilan, No. 100, Jakarta, Januari 1994, hal. 98.

Pasal 18 sampai dengan Pasal 29 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang No. 15 Tahun 2002, dengan sendirinya harus merupakan suatu institusi yang tangguh lagi kredibel dan dapat dipercayai sepenuhnya oleh masyarakat untuk mengemban tugas itu.

Sebab bagaimana sekali pun, pihak mafia atau mereka yang bergabung dalam suatu sindikat kejahatan atau yang lazim dinamakan "organized crime" akan selalu berusaha dan berupaya untuk membangun jaring-jaring kaki tangannya atau mata-matanya dan akan menerobos masuk sampai ke dalam dunia perbankan.

Sungguh suatu problematik yang sangat sulit dan rumit untuk menelusuri masalah "money laundering" yang penuh dengan kerahasiaan atau yang dirahasiakan, karena banyak pihak yang akan terlibat dan dilibatkan. Para aparat penegak hukum khususnya, yaitu baik itu Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisian Republik Indonesia atau para pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait dengan "money laundering", harus benar-benar menyiapkan sumber daya manusianya secara maksimal, karena pasti akan sangat sulit untuk memperoleh informasi dan datanya, terutama dari dunia perbankan dan lembaga keuangan.

Berdasarkan kajian singkat sebagaimana diuraikan di atas, maka menarik untuk diteliti lebih lanjut dari sudut eksistensi dan prospek perkembangan kejahatan "money laundering" sebagai suatu kejahatan berdimensi baru di

Indonesia. Dalam konteks itu akan disimak pula sampai seberapa jauh upaya Pemerintah dalam rangka mengatasi “money laundering” ini. “Money laundering” diduga erat bertalian dengan problematik korupsi, sehingga pemberantasan “money laundering” benar-benar akan sangat diharapkan. Dengan tingkat permasalahan korupsi yang sudah begitu parah dan merasuk hampir di seluruh bidang dan institusi di negara kita, serta pelbagai hambatan internal dan eksternal dalam upaya penegakan hukum, maka hambatan yang dihadapi dalam upaya mengatasi perkembangan problematik “money laundering” untuk memberantas korupsi bukanlah suatu tugas dan pekerjaan yang mudah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan difokus untuk dibahas dalam tulisan ini adalah :

1. ada sangkaan bahwa kejahatan “money laundering” atau pencucian uang sudah sering dilakukan di Indonesia. Bila hal itu benar bagaimana cara memberantasnya, padahal Pemerintah masih belum juga membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang bertugas mencegah dan menindak tindak pidana pencucian uang;

2. apakah dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang dapat sekaligus menindak pelaku tindak pidana korupsi;
3. apakah formulasi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diundangkan ini sudah sejalan dengan (Rencana) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?

Permasalahan Tindak Pidana Pencucian Uang “an sich” yang akan dibahas ini harus diakui sangat sulit untuk ditelusuri secara faktual atau melalui suatu penelitian empirik. Kendatipun demikian diharapkan kajian ini dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran yang walaupun sangat sederhana, namun diharapkan dapat bermanfaat sebagai langkah permulaan, baik untuk tugas kajian lebih lanjut, ataupun sebagai setitik sumbangan pemikiran dalam rangka mensosialisasikan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Tinjauan Pustaka

“Money Laundering” atau yang lazim dikenal sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Pasal 3 butir 1 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 15 Tahun 2002 adalah :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- b. mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- c. membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- d. menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- e. menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- f. membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
- g. menukarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya; atau
- h. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Sutan Remy Syahdeini dengan merujuk pada tulisan Sarah N. Welling menulis bahwa money laundering dimulai dengan adanya 'uang kotor' atau uang haram (dirty money), di mana uang kotor ini dapat dimiliki melalui dua cara :

pertama, yaitu melalui pengelakan pajak (tax evasion). Yang dimaksud dengan “pengelakan pajak” ialah memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan penghitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh;

kedua, yaitu memperoleh uang tetapi dengan cara-cara yang melanggar hukum. Cara-cara yang demikian dilakukan dalam hal ini, antara lain berupa penjualan obat-obat terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (drug sales atau drug trafficking), perjudian gelap (illegal gambling), penyuapan (bribery), terorisme (terrorism), pelacuran (prostitution), perdagangan senjata (arms trafficking), penyelundupan minuman keras, tembakau dan pornografi (smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography), penyelundupan imigran gelap (illegal immigration rackets atau people smuggling), korupsi (corruption) dan kejahatan kerah putih (White Collar Crime).⁴

Uang kotor yang diperoleh tersebut harus “dikonversikan” menjadi uang sah, yaitu dengan cara yang disebut "pencucian" (laundering), sebelum uang tersebut

⁴ Sarah N. Welling dalam tulisan Sutan Remy Sjahdeini, Money Laundering, Makalah disampaikan pada Forensic Accounting, Money Laundering, dan Efisiensi Kinerja Perusahaan, Jakarta, Mei 2000, hal. 2-3.

dapat diinvestasikan secara sah atau dibelanjakan tanpa menimbulkan kecurigaan.

Selanjutnya David Fraser dalam rujukan tulisan Sutan Remy Syahdeini, mengemukakan bahwa "Money Laundering is quite simply the process through which 'dirty' money (proceeds of crime), is washed through 'clean' or legitimate sources and enterprises so that the 'bad guys' may more safely enjoy their ill gotten gains".⁵

Sejalan dengan pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa dalam praktek "money laundering" dikenal dua cara atau modus operandi kejahatan ini, yaitu :

pertama, menukarkan uang haram atau uang kotor dengan cara-cara yang sah dengan melakukan investasi jangka pendek, seperti membeli surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan tanpa mengungkapkan asal usul uang, menyimpannya beberapa waktu dan kemudian menjual kembali dengan kontan bila diperlukan;

kedua, menggunakan uang yang diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum untuk melakukan investasi jangka panjang dan menengah melalui pembelian aset tetap. Misalnya investasi dalam proyek, pembelian tanah atau "property" sehingga pemilik dapat menikmati kekayaan melalui keuntungan yang didapat tanpa harus khawatir akan ketahuan asal usul uangnya.⁶

⁵ *Ibid.* hal 1.

⁶ M. Zaky Achta , Money Laundering Sulit Ditemukan di Indonesia, Suara Pembaharuan, Jakarta, 1993, hal. II, kolom 4-9.

Pada hakekatnya para pelaku yang terlibat dalam "money laundering", biasanya dan pada umumnya menerima uang kotor yang diperoleh dalam bentuk tunai. Uang kotor tersebut berasal dari tindak pidana kejahatan, misalnya penjualan obat-obatan terlarang. Uang tunai memang lebih dikehendaki, karena dengan memperoleh uang tunai maka pelaku "money laundering" akan terhindar dari pembuktian bila tertangkap (tangan). Sikap untuk tidak mau menerima uang dalam bentuk yang lain, seperti cek dan kertas-kertas berharga, didasarkan atas prinsip agar tidak ingin diketahui sumber atau asal muasal uang tersebut. Lagi pula dengan memiliki uang tunai, maka tidak akan mudah untuk ditelusuri dan diketahui siapa sesungguhnya pemilik uang yang sebenarnya. Dengan demikian apabila uang tunai tersebut telah berhasil dimasukkan dalam sebuah lembaga keuangan seperti bank, maka melalui proses "pencucian", uang haram tersebut akan mengalami suatu proses, sehingga pada akhirnya tidak lagi dapat dideteksi apakah uang-uang itu berasal dari sumber yang haram atau dari suatu aktivitas terlarang atau yang berasal dari kejahatan.

Untuk itu akan dijelaskan tiga tahapan pencucian uang atau "money laundering" yang biasanya dilakukan oleh para pelaku "money laundering" yaitu :

pertama, apa yang dinamakan "placement", yaitu konversi dari uang tunai yang diperoleh secara melawan hukum ke dalam pelbagai aset. Dengan "placement" dimaksudkan "the

physical disposal of cash proceeds derived from illegal activity".⁷ Atau dengan perkataan lain, fase pertama dari proses pencucian uang haram ini ialah memindahkan uang haram dari sumber di mana uang itu diperoleh untuk menghindarkan jejaknya. Atau secara lebih sederhana agar sumber uang tersebut tidak diketahui oleh pihak penegak hukum. Metode yang paling penting dari "placement" ini adalah apa yang disebut sebagai "smurfing".⁸ Melalui "smurfing" ini, maka keharusan untuk melaporkan transaksi uang tunai sesuai peraturan perundangan yang berlaku dapat dikelabui atau dihindari;

kedua, apa yang dinamakan "layering", yaitu membuat transaksi-transaksi finansial yang kompleks dan berlapis-lapis serta berangkai, yang dilindungi oleh berbagai bentuk anonimitas dan rahasia profesional. Hal ini akan mempersulit kerja para penegak hukum untuk mendeteksi jaringan "money laundering".

Strategi "layering" pada umumnya meliputi antara lain, dengan mengubah uang tunai menjadi aset fisik, seperti kendaraan bermotor, barang-barang perhiasan dari emas atau batu-batu permata yang mahal, atau "real estate", atau instrumen keuangan seperti "money orders, cashiers cheques

⁷ Sahetapy, J.E., Problematik Pencucian Uang, Makalah, Surabaya, 1995. hal. 11.

⁸ Pemahaman tentang "smurfing" demikian. "The 'smurf' changes the small denomination bills into large denomination bills, cashier's checks, or money order by repetitively visiting bank after bank with amounts insufficient to arouse suspicion". Juga dikatakan bahwa "A smurf is a drug money courier, named after the small blue cartoon character of that name" (Sarah N. Welling, 1989).

or securities and multiple electronic transfers of funds to so called 'bank secrecy havens'", seperti di Switzerland atau di "Caymen Islands".⁹

ketiga, apa yang dinamakan "integration", yaitu tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan. Dengan perkataan lain, si penjahat harus mengintegrasikan dana dengan cara legitimasi ke dalam proses ekonomi yang normal. Hal ini mencakup perbuatan-perbuatan mendayagunakan uang deposito di bank untuk mendukung pinjaman guna kepentingan operasionalisasi kejahatan. Namun hal ini dapat juga dilakukan dengan cara menyampaikan laporan palsu yang menyangkut pinjaman uang.

Semua perbuatan dalam proses pencucian uang haram ini memungkinkan para raja uang haram ini menggunakan dana yang begitu besar itu dalam rangka mempertahankan ruang lingkup kejahatan mereka atau untuk terus berinteraksi dalam dunia kejahatan. Memang tali temali problematik "money laundering" ini acapkali tampak seperti benang kusut, karena acapkali tidak konsistensi dengan permasalahan dunia perekonomian dan keuangan yang tentu juga harus menjadi perhatian utama dari pihak pemerintah. Karena itu Loebby Loqman berpendapat, perlu dibedakan cara pandang ekonomi dan hukum dalam tindak pidana pencucian uang ini. Menurut Loebby Loqman, cara pandang ekonomi

⁹ Sahetapy, op. cit., hal 12.

terarah pada suatu sistem ekonomi yang bersifat makro, sehingga yang diperhatikan adalah efisiensi dari peredaran uang tersebut, serta sejauh mana kegunaan sejumlah uang bagi kepentingan perekonomian. Sedangkan dari sudut pandang hukum, dipersoalkan dari mana asal suatu kekayaan.¹⁰

Itulah sebabnya, dapat dimengerti bahwa kejahatan ini tidak mudah untuk diatasi, apalagi bila berhubungan dengan korupsi yang kerap kali dilakukan oleh pihak yang berkuasa. Namun keadilan dan kebenaran tetap harus ditegakkan dan dijalankan, demikian pula dengan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .

D. Tujuan Penelitian

Adanya suatu dasar pemikiran bahwa untuk memberantas tindak pidana korupsi, juga terhadap tindak pidana lainnya dalam suatu strategi yang baru, diperlukan penerapan peraturan perundang-undangan secara integratif. Secara integratif di sini dimaksudkan dalam upaya menerapkan penggabungan beberapa peraturan perundang-undangan di bidang hukum yang berbeda sebagai landasan hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, seperti untuk memberantas tindak pidana korupsi tidak semata-mata melalui Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, melainkan

¹⁰ Loebby Loqman, RUU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau dari Hukum Acara Pidana, Workshop the Draft Money Laundering Law, Jakarta, 2000, hal 1.

dapat juga melalui Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Cara yang lain yaitu dengan mempelajari problematik pencucian uang ini melalui suatu pendekatan dengan menggunakan teori interaksionis. Yang dimaksud dengan teori interaksionis dapat diterangkan demikian. Pemahaman para teorisi interaksionis berakutak dengan pemahaman secara relatif. Mereka melihat perilaku tidak sebagai sesuatu yang secara intrinsik bersifat devian. Yang dimaksud devian yaitu bergantung dari penamaan terhadap perilaku itu dalam suatu budaya atau suatu waktu tertentu. Para interaksionis sangat menaruh perhatian pada apa yang dinamakan "proses sosial". Oleh karena itu dalam menjelaskan perilaku devian, para interaksionis menekankan pada peranan dari makna (meaning). Mereka menggunakan metode penelitian yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para teorisi positivis. Itulah sebabnya para interaksionis selalu curiga terhadap tehnik penelitian dengan menggunakan wawancara terstruktur, angka-angka statistik dan atau daftar tanya, karena akan terjadi semacam jarak antara kedua belah pihak. Jadi tidaklah mengherankan kalau para interaksionis sangat menyukai pendekatan secara informal dalam mengumpulkan data, misalnya dengan menggunakan wawancara secara semi-terstruktur, wawancara tidak terstruktur dan pengamatan berpartisipasi. Goode (1984) mengemukakan tiga kunci pangkal tolak untuk para interaksionis : 1. orang beraksi

berdasarkan makna (meaning); 2. makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat (intimate others); 3. makna terus menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain dan situasi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para interaksionis berharap dapat membangunkan "pemahaman yang simpatik" pada mereka yang dipandang sebagai devian (jahat), sehingga lebih dapat mengerti akan perilaku mereka itu.¹¹

Harus diakui bahwa penerapan pendekatan interaksionis belum dapat diterapkan secara sepenuhnya oleh karena sulit ditemukan para pelaku. Namun, dengan membaca pelbagai bahan bertalian dengan "money laundering" dan "interaksi" yang bertalian dengan korupsi melalui ungkapan mass media, maka setidaknya-tidaknya dapat diperoleh suatu gambaran atau semacam pemahaman antara relasi korupsi dengan money laundering.

Penulisan tesis ini tidak didasarkan atas suatu harapan yang muluk-muluk, melainkan lebih merupakan suatu usaha permulaan berupa presentasi yang sederhana, tetapi semoga dapat dipertanggungjawabkan kualitas penulisannya. Untuk itu akan dilakukan suatu pendekatan yang lebih bersifat deskriptif-analitik dengan menyimak dan berusaha mengkaji sumber tulisan dari kepustakaan baik dari luar maupun dari dalam negeri secara interaksionistis.

¹¹ Sahetapy, J.E., Teori Kriminologi Suatu Pengantar, Citra Aditya, Bandung, 1992, hal.5.

Diharapkan dengan demikian dapat diperoleh masukan untuk mengkaji sampai seberapa jauh Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau problematik “money laundering” ini, dapat dipertanggung jawabkan dan diterapkan atau dapat mengurangi atau membantu usaha-usaha yang bertalian dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

E. Kontribusi Penelitian

Sebagaimana dikemukakan di atas, baik dalam perumusan masalah maupun dalam tujuan penelitian, maka kontribusi atau hasil penelitian akan sangat mendukung, jika itu memang ada, bagi dunia ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah secara khusus untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No. 15 Tahun 2002. Selain itu, secara praksis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga-lembaga baik itu lembaga peradilan, perbankan, lembaga keuangan non bank maupun lembaga-lembaga lain yang ikut peduli terhadap masalah korupsi dan pencucian uang, di samping juga masyarakat secara luas dalam rangka ikut menegakkan keadilan dan kebenaran dalam era reformasi menuju suatu masyarakat yang tertib hukum, dalam hal ini masyarakat kewargaan atau “civil society”.

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Permasalahan

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah tentang Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No. 15 Tahun 2002 atau money laundering yang telah diundangkan serta implementasinya oleh Pemerintah dan hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang marak terjadi di Indonesia. Masalah yang demikian dengan menggunakan pendekatan interaksionistis karena mengutamakan pemahaman tinjauan dari perilaku yang melawan norma hukum.

Sebagaimana dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro yang menulis dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, yang menjelaskan bahwa, penelitian hukum normatif memiliki 6 tipe, yaitu :

- 1) penelitian inventarisasi hukum positif, yang merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum dari tipe-tipe yang lain;
- 2) penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, yang dilakukan terhadap norma-norma hukum;
- 3) penelitian untuk menemukan hukum in concreto bagi suatu peristiwa tertentu;
- 4) penelitian terhadap sistematika peraturan perundang-undangan;
- 5) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan terhadap taraf sinkronisasi horizontal;

6) penelitian perbandingan hukum positif.¹²

Penelitian dengan menggunakan pendekatan interaksi yang bertalian dengan hukum normatif yang digunakan di sini adalah yang pertama, yaitu penelitian inventarisasi hukum positif, yang sesungguhnya merupakan kegiatan mendasar sebelum diketemukannya norma hukum in concreto atau sebelum diketemukan teori-teori tentang proses kehidupan hukum. Ronny Hanitijo Soemitro menulis bahwa :

Kerap kali ada anggapan bahwa kegiatan inventarisasi hukum positif sebenarnya hanya merupakan pekerjaan kumpul-mengumpulkan saja dan pekerjaan kumpul-mengumpulkan sukar untuk dimasukkan sebagai kegiatan penelitian. Sanggahan terhadap pendapat ini adalah bahwa kegiatan yang dikatakan sekedar kumpul-mengumpulkan itu sebenarnya dilakukan melalui proses identifikasi yang kritis-analitis dan selanjutnya melalui proses klasifikasi yang logis-sistematis. Selain itu kegiatan-kegiatan tadi serupa dengan kegiatan yang di bidang ilmu-ilmu lain lazim diakui sebagai proses penelitian atau bagian utama dari suatu proses penelitian.¹³

Dengan pertimbangan seperti di atas, maka titik tolak penelitian ini adalah analisis terhadap Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No. 15 Tahun 2002 dan juga peraturan-peraturan perundang-

¹² Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 12.

¹³ *Ibid.* Hal. 13.

undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, serta yang bertalian dengan unsur-unsur korupsi yang sudah mempunyai dasar hukum positifnya di Indonesia.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan, di mana data sekunder lebih diutamakan daripada data primer, sebab yang terakhir ini sulit diperoleh. Data sekunder yang diteliti, terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, antara lain :
 - a. peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah pencucian uang;
 - b. peraturan perundang-undangan yang menyangkut korupsi, perbankan, psikotropika, dan lain-lain;
 - c. Hasil Kongres PBB mengenai "Money Laundering".
2. Bahan hukum sekunder, antara lain:
 - a. tulisan atau pendapat para pakar dan praktisi hukum maupun pakar ekonomi mengenai problematik "money laundering" dan korupsi;
 - b. hasil-hasil penelitian tentang "money laundering" dan korupsi;
 - c. Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - d. Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;
 - e. rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Bahan hukum tersier, antara lain :

- a. Kamus Hukum (Legal dictionary);
- b. Berbagai majalah dan koran dari media massa di samping jurnal tentang hukum dan ekonomi.

3. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan sifat penelitian yang deskriptif - analitis dan pendekatan yang normatif - kualitatif, maka pengumpulan data dilakukan melalui :

- a. studi kepustakaan, dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai bahan dari dalam dan luar negeri, di samping sumber data lain yang tertulis;
- b. observasi lapangan, dengan cara mengikuti berbagai seminar dan pertemuan yang membicarakan tentang "money laundering" dan juga korupsi, serta melakukan wawancara terhadap pihak-pihak dan juga para pakar yang erat hubungannya dengan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

4. Penyajian Data dan Analisis

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun observasi di lapangan dikumpulkan dan ditelaah, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif dan diambil hasil analisis yang bersifat normatif kualitatif dengan proses berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum.

B A B II

MONEY LAUNDERING DAN KORUPSI

A. Pemahaman Tentang Money Laundering

Istilah “money laundering” berasal dari Amerika Serikat, yaitu mulai diperkenalkan di sekitar tahun 1930 sampai tahun 1940. Pada waktu itu para pelaku kejahatan terorganisasi alias mafia di Amerika Serikat (AS) yang melegitimasi uang mereka dari hasil-hasil kejahatan mereka dengan membeli suatu Laundry (binatu) dan memutar uang hasil kejahatan itu di dalam bisnis ini sehingga menjadi uang halal (sah).¹⁴ Konon mengapa bisnis binatu itu yang dipilih, ternyata alasannya sederhana saja yaitu karena bisnis binatu adalah bisnis halal, mudah memperoleh uang kecil dalam jumlah besar dan yang gampang mendatangkan keuntungan. Kasus “pizza connection” yang terkenal pada tahun 1984 merupakan kasus “money laundering” yang pertama kali ditangani oleh Interpol. Hampir sebanyak 600 (enam ratus) juta US dollar uang mengalir ke bank-bank di Swiss dan Italia dari restoran-restoran pizza yang tersebar luas di seluruh kawasan Amerika Serikat. Patut diketahui bahwa “narco dollar” yang pada umumnya menyangkut uang yang jumlahnya sangat besar, ternyata diketahui juga merupakan

¹⁴ Koesparmono Irsan, Peranan Hukum Nasional dalam Memberantas Money Laundering, Seminar BPHN, Jakarta, Maret 1997, hal. 3.

hasil dari “money laundering”, yang secara langsung atau tidak langsung telah mempengaruhi ekonomi di banyak negara di dunia.

Selain itu, seiring dengan kemajuan teknologi dan deregulasi ekonomi telah mendorong kejahatan “money laundering ini semakin mudah untuk dijalankan dan semakin canggih untuk dilakukan. Misalnya, pada saat kejayaan seorang penjahat yang bernama Al Capone, di mana untuk mencuci sejumlah uangnya yang didapat dari hasil dunia hitam, ia memilih Meyer Lansky yang dijuluki “si genius” (seorang non-Italia, orang Polandia) menjadi akuntan dari Al Capone. Cara Lansky mencuci uang tersebut yaitu melalui usaha binatu (laundry), perjudian legal maupun “offshore-banking”. Tujuan utama dari “offshore-banking” ini ialah sebagai pelabuhan transito dari uang haram tersebut. Ketika aparat hukum berhasil menjerat Capone dengan pasal-pasal penggelapan pajak, maka terbongkar pula bisnis-bisnis binatu tersebut.¹⁵

Saat ini kejahatan “money laundering” disadari atau tidak sudah merambah masuk ke segala penjuru negara di dunia. Oleh sebab itu, mulai sejak tahun 1980-an masalah “money laundering” telah sering dibahas dalam pertemuan-pertemuan baik dalam skala internasional maupun yang nasional. Hal ini dapat dilihat, misalnya, dalam Pertemuan Ekonomi Tingkat Tinggi di Paris dari tujuh negara industri

¹⁵ *Ibid.*, hal. 8.

utama pada bulan Juli 1989 (The 16th Meeting); Ministerial Meeting on the Creation of an Effective United Nation Crime Prevention and Criminal Justice Programme di Paris, bulan November 1991; juga dalam The 5th International Anti-Corruption Conference di Amsterdam pada bulan Maret 1992; serta banyak pertemuan lain, khususnya akhir-akhir ini yang membahas masalah "money laundering".¹⁶

Begitu banyaknya perhatian dari berbagai negara di dunia yang menunjukkan masalah money laundering bukan masalah suatu negara tertentu saja. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa Crime Prevention and Criminal Justice Branch, Center for Social Development and Humanitarian Affairs, UN Office Wina yang juga memperhatikan masalah money laundering dengan memberikan laporan dengan judul "World Crime Trends and Justice : Facts, Figures and Estimates", yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

*Money laundering generates worldwide US \$ 300 billion annually mostly from illegal drug business. This was twice as much as the national budget of Germany (West), about 150 times more than entire United Nation budget for biennium 1990 -1991 and finally, about one third of the global military expenditure in 1989. In the USA alone it is estimated that daily US 22 million of illegal drug funds is spirited out of the country and that annually US 100 to US 110 billion is electronically transferred from one bank account to another, to clean dirty money.*¹⁷

¹⁶ Muladi, Tindak Pidana "Money Laundering" dan Permasalahannya, Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi untuk Dosen-Dosen FH seIndonesia, Semarang, Januari 1993, hal.1.

¹⁷ *Ibid.*, hal 4.

Jadi uang yang “dicuci” berdasarkan laporan di atas, amat sangat besar. Untuk Indonesia belum ada data konkrit mengenai “money laundering” ini. Selain hal-hal tersebut di atas, langkah-langkah untuk memerangi “money laundering” telah banyak pula dilakukan di berbagai negara, misalnya sebagai berikut :¹⁸

- a). memperkuat proses pemeriksaan transaksi yang canggih. Hal ini dilakukan dengan memperbaiki metode-metode pemeriksaan yang direkomendasikan oleh organisasi antar pemerintah seperti “The Financial Action Task Force on Money Laundering” (FATF) dan “Inter American Abuse Control Commision”;
- b). beberapa rekomendasi yang dibuat, antara lain oleh “Council of Europe Money Laundering Directive of the Europe Community the CIDAD model Regulations” dan FATF menganjurkan bank untuk menerapkan “Know Your Customer” (kenali nasabah anda);
- c). lembaga keuangan harus menyelidiki transaksi-transaksi yang jumlahnya besar, yang tidak biasa dan transaksi yang tidak mempunyai tujuan ekonomi. Lembaga keuangan harus meneliti latarbelakang dan tujuan transaksi tersebut, membuat laporan tertulis, membantu para pengawas, auditor dan penegak hukum. FATF mendorong agar lembaga-lembaga keuangan menerapkan

¹⁸ Heru Winarno, Kerjasama Internasional Dalam Pemberantasan Money Laundering, BPHN, Jakarta 1999, hal. 108.

penelitian, baik dalam transaksi antar bank maupun transaksi antara bank dengan nasabahnya.

Bank maupun lembaga-lembaga keuangan harus mengidentifikasi dan melaporkan transaksi-transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya. Ketentuan-ketentuan semacam ini kalau ingin memberantas "money laundering" harus dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan nasional;

- d). memonitor pembawa dana dalam bentuk tunai atau pembawa perhiasan logam mulia atau permata ke dalam suatu negara. FATF mengusulkan agar Pemerintah-Pemerintah "consider the feasibility of subjecting all crossborder transfer, above a given threshold, to verification, administrative monitoring, declaration of record keeping requirements";¹⁹
- e). pada simposium ketiga Money Laundering di Tokyo bulan Desember 1995, telah terbentuk "ASIA / PASIFIC STEERING GROUP ON MONEY LAUNDERING" yang bertujuan untuk menegakkan hukum anti money laundering, meningkatkan koordinasi antar negara peserta dan pemberian latihan teknis. Saat ini anggota group atau kelompok tersebut, terdiri atas : Jepang, Singapura, Hongkong, Selandia Baru dan Australia;
- f). pada tanggal 25 sampai 27 Februari 1997 di Bangkok telah dilaksanakan simposium keempat Money Laundering

¹⁹ *Ibid.*

yang dihadiri oleh 29 (dua puluh sembilan) negara dari Asia Pasific dan 8 (delapan) organisasi internasional yang bertujuan meningkatkan komitmen global dalam memerangi money laundering serta rencana pemberian training bagi para penyelidik agar dapat mengetahui seluk beluk dan pemberantasan tindak pidana “money laundering” ini.

Agar lebih jauh dapat mendalami masalah “money laundering”, maka perlu dilihat dan diperhatikan apa yang dimaksud dengan “money laundering”. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai apa yang disebut dengan “money laundering” (pencucian uang), sebab pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara yang telah maju dan negara-negara dari dunia ketiga, masing-masing mempunyai definisi sendiri tentang “money laundering” berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda.²⁰

Berdasarkan apa yang telah ditulis di atas, ada baiknya untuk menyimak dengan lebih cermat apa sesungguhnya “money laundering” itu. Ada beberapa definisi atau penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “money laundering”, di antaranya dari Pamela H. Bucy dalam bukunya yang berjudul “White Collar Crime : Cases and

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, Money Laundering, pada Seminar “Forensic Accounting, Money laundering dan Efisiensi Kinerja Perusahaan”, Jakarta, Mei 2000, hal 1.

Materials”, yang dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini di mana yang bersangkutan memberikan pengertian “money laundering” sebagai berikut :

*Money laundering is the concealment of the existence, nature or illegal source of illicit funds in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered.*²¹

David Fraser meskipun dengan kata-kata yang berbeda, tetapi substansinya sama mengemukakan bahwa :

*Money Laundering is quite simply the process through which ‘dirty’ money (proceeds of crime), is washed through ‘clean’ or legitimate sources and enterprises so that the ‘bad guys’ may more safely enjoy their ill gotten gains.*²²

Sedangkan Chaikin dalam nada yang serupa memberikan definisi “money laundering”, sebagai berikut :

*The process by which one counceals or disguises that true nature, source, disposition, movement or ownership of money for whatever reason.*²³

Department of Justice Canada mengemukakan bahwa :

Money laundering is the conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from criminal activity, for the purpose of concealing the illicit nature and origin of the property from government authorities.

Dalam “Statement on Prevention of Criminal Use of The Banking System for the Purpose of Money Laundering” yang

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.* hal 2.

²³ *Ibid.*

dikeluarkan pada bulan Desember 1988, Basle Committee tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan money laundering, tetapi menjelaskan mengenai apa yang dimaksudkan dengan money laundering itu dengan memberikan beberapa contoh kegiatan yang tergolong kegiatan-kegiatan yang disebut money laundering. Dikemukakan dalam Statement tersebut antara lain sebagai berikut :²⁴

Criminal and their associates use the financial system to make payment and transfers of funds from one account to another; to hide the source and beneficial ownership of money; and to provide storage for bank- notes through a safe deposit facility. This activities are commonly referred to as money laundering.

KUHP Swiss dalam Pasal 305 bis dan 305 ter, di mana pasal-pasal tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1990, melarang "money laundering" dengan perumusan demikian :

1. *Whoever commits an act designed to obstruct the establishment of provenance, the discovery or the confiscation of assets which he knows, or must assume, to be derived from a crime will be punished with imprisonment of a fine.*
2. *In serious cases the punishment will be penal servitude up to five years or a prison sentence. The sentence will be combined with a fine of up to one million Swiss Francs. A case is considered serious in particular if the offender :*
 - a. *acts as a member of a criminal organization;*

²⁴ *Ibid.*

- b. *act as a member of a gang which was formed for the purpose of continual money laundering;*
 - c. *act as a professional money launderer, thereby producing a large turnover or substantial profit*
3. *The offender will also be punished if the principle offense was committed abroad in a jurisdiction where it is also punishable by law.*

Perumusan Pasal 305 bis dari KUHP Swiss di atas tampaknya perlu disempurnakan, sehingga kemudian dirumuskan kembali dalam usul tambahan Pasal 305 ter sebagai berikut :

Whoever accepts, deposits, helps to invest or to transfer assets of a third party on a professional basis and fails to verify the identity of the beneficial owner with the diligence that can reasonably be expected under the circumstances will be punished with imprisonment up to one year, detention, or a fine.

Jadi meskipun rumusan-rumusan mengenai “money laundering” tadi menggunakan kata-kata atau redaksi yang berbeda-beda, tetapi pada inti substansinya mengandung komponen-komponen yang sama dan relevan yaitu :

- a. uang “money laundering” adalah uang haram biasa disebut juga uang kotor (dirty money);
- b. uang haram tersebut berasal dari kegiatan-kegiatan yang melawan hukum atau berasal dari kejahatan;
- c. agar uang haram itu tampak halal dan dapat dipergunakan dalam aktivitas tanpa dicurigai, maka uang itu harus “dicuci” melalui suatu proses;

- d. proses “money laundering” demikian dapat “dicuci” melalui dunia perbankan atau yang lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- e. “money laundering” dengan demikian adalah suatu tindak kejahatan yang harus diatur melalui perundang-undangan pidana.

Selanjutnya dalam membicarakan tentang “money laundering”, ada baiknya untuk menyimak sikap “United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs, and Psychotropic Substances” (19 November 1991). Karena Konvensi ini mensyaratkan 20 negara yang harus meratifikasinya. Perbuatan yang termasuk dalam “money laundering” terlihat dalam Article 3 (Offences and Sanctions), yaitu “Money Laundering means the following conduct when committed intentionally :

- *the conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from criminal activity or from an act of participation in such activity, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such activity to evade legal consequences of his action;*
- *the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from criminal activity or from an act of participation in such activity;*
- *the acquisition, possession or use of property, knowing at the time of receipt, that such property was*

- derived from criminal activity or from an act of participation in such activity;*
- participation in, association to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the action mentioned in the foregoing paragraphs.*

Dengan lahirnya “United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drug and Psychotropic Substances” atau lebih terkenal dengan UN Drug Convention 1988, konvensi mana merupakan batu loncatan bagi terciptanya “International Anti-Money Laundering Legal Regime”. Selanjutnya pada tahun 1989 dan 1990 negara-negara yang tergabung dalam G-7 melahirkan “The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)” yang bertujuan mendorong negara-negara agar menyusun peraturan perundang-undangan untuk mencegah mengalirnya uang hasil perdagangan narkoba dan yang lainnya baik melalui bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Pada bulan April 1990, FATF memperluas pesertanya mencakup pusat keuangan di 15 negara yang kemudian mengeluarkan rekomendasi yang sejajar dengan UN Drug Convention agar negara-negara menciptakan sendiri peraturan perundang-undangan mengenai money laundering.²⁵

Salah satu contoh perumusan Undang-Undang tentang “money laundering” dari suatu negara yang ada di kawasan Asia seperti Thailand ternyata telah memiliki “Money

²⁵ Koesparmono Irsan, op.cit., hal. 9.

Laundering Prevention and Suppression Law”, yang memuat tindak pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :²⁶

- (1) *offences relating to drugs under the Prevention and Suppression of Drugs Act or Measures on Suppression of Offenders Relating to Narcotic Drugs Act;*
- (2) *offences relating to sexuality under the Criminal Code, being restricted to procurement, seduction or taking away for indecent act of a girl or women in order to gratify the sexual desire of another person and offences relating to taking away children and minor under Measures on Prevention and Suppression of the girl and women trafficking; or*
- (3) *an offence relating to arms trafficking under the Law relating to Arms, Ammunition, Explosives, Fireworks, and Ersatz Arms;*
- (4) *offences relating to loan of money amounting to cheating and fraud against the public under the Law on Loan of Money Laundering Amounting to Cheating and Fraud Against the Public;*
- (5) *offences of cheating and fraud to the public under the Criminal Code;*
- (6) *corruption (bribery and abuse of power);*
- (7) *offences relating to financial institutions.*

Dengan demikian komponen-komponen “money laundering” dalam rumusan untuk menjadi suatu tindak pidana makin disempurnakan dengan memasukkan istilah-istilah yuridis tertentu, antara lain seperti “cheating, fraud, corruption”.

Jadi dapat dibayangkan bahwa modus operandi “money laundering” sangat bervariasi sesuai dengan tingkat kejihaan para pelaku yang bersangkutan. Meskipun

²⁶ Harkristuti Harkrisnowo, Money Laundering sebagai Bagian dari White Collar Crime, Makalah pada Seminar Money Laundering, di Bali, Juli 2001, hal. 6.

demikian, pada pokoknya tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang hampir sama dilakukan oleh setiap pelaku dalam melakukan kegiatan “money laundering” ini. Praktek money laundering dilakukan dalam tahapan-tahapan sebagai berikut.

1. The placement yakni konversi atau tahap pengumpulan dan penempatan uang tunai yang diperoleh dari kejahatan atau perbuatan melawan hukum ke dalam pelbagai tempat tertentu seperti deposito bank, real estate atau saham-saham yang diperkirakan aman untuk sementara waktu.
2. The layering yaitu tahapan pelapisan yang berisi kegiatan membuat transaksi-transaksi finansial yang kompleks dan rumit serta berlapis-lapis, yang dilindungi oleh pelbagai bentuk anonimitas dan rahasia profesional. Ini dimaksudkan untuk menghilangkan jejak atau ciri-ciri asli dari uang hasil kejahatan dan mempersulit pelacakan oleh penegak hukum dalam upaya mendeteksi jaringan money laundering. Misalnya mentransfer dalam bentuk uang asing ke negara lain, pembelian saham di bursa efek dengan menggunakan deposit yang ada di bank X untuk meminjam uang di bank Y.
3. The integration yaitu tahap mengumpulkan dan menyatukan uang hasil kejahatan yang telah melalui proses layering dalam suatu proses arus keuangan yang sah. Tahap ini berupa tipu muslihat guna dapat

memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan. Dan pada tahapan ini uang hasil kejahatan benar-benar telah menjadi bersih sehingga sulit untuk dikenali atau diakui sebagai uang hasil kejahatan. Misalnya mencakup perbuatan-perbuatan dalam rangka mendayagunakan uang deposito di bank untuk mendukung pinjaman guna kepentingan operasional kejahatan.²⁷

Tahap-tahap ini harus dilakukan agar dengan demikian uang haram dapat dicuci dan menjadi legitimasi uang halal. Mengingat perbuatan “money laundering” begitu merugikan, maka yang perlu diperhatikan dan diamati bukan saja modus operandinya, melainkan juga menyangkut hal-hal lain yang menunjang untuk memberantas problematik “money laundering” ini. Untuk itu di pelbagai negara, pengaturan tentang “money laundering” selalu disertai dengan peraturan administratif tentang apa yang dinamakan “reporting requirements”. Pengamatan terhadap model-model yang dilakukan oleh pelbagai negara tentang sistem laporan menghasilkan 3 (tiga) kategori sebagai berikut.

1. “Non-discriminating system”. Dalam sistem ini (USA dan Australia), setiap transaksi tunai di atas US \$ 10.000 harus dilaporkan, sekalipun tidak terdapat sama sekali kecurigaan terhadap transaksi karena tidak wajar. Cara ini mengandung kelemahan berupa pengurangan kepekaan

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *loc. cit.*

dan tanggung jawab para pejabat lembaga-lembaga keuangan terhadap transaksi yang patut dicurigai, membutuhkan waktu dan biaya serta dapat diakali dengan “smurfing”, yaitu membagi-bagi jumlah transaksi menjadi kecil-kecil, sehingga tak perlu dilaporkan.

2. “Discriminating system”. Dalam system ini (biasa dilakukan di Inggris dan Australia), yang digunakan sebagai kriteria yang harus dilakukan adalah bila terjadi apa yang dinamakan “suspicious /unusual transaction”. Keuntungan dari sistem ini adalah bahwa bank-bank tetap harus selalu siaga dan mengamati atau menyimak jumlah laporan yang tidak terlalu berlebihan (manageable).
3. Di Belanda, bank-bank tidak dalam posisi untuk menilai apakah transaksi patut dicurigai atau tidak, sebab hal tersebut merupakan tugas polisi. Semua transaksi melalui bank yang dianggap “unusual” dilaporkan ke Reporting Agency, yang merupakan lembaga pemerintah. Lembaga inilah yang akan menseleksi mana yang patut dicurigai dan mana yang tidak. Yang mencurigakan dilaporkan kepada polisi yang kemudian harus melakukan penyidikan. Dengan demikian lembaga tersebut bertindak sebagai “intermediary selecting body” antara bank dan polisi.²⁸

Meskipun sudah ada “Reporting Agency” atau “intermediary selecting body”, itu tidak berarti bahwa “money laundering”

²⁸ Muladi, *loc.cit.*

dapat dengan mudah diatasi. Tentu saja tidak mudah untuk memberantas praktek “money laundering” ini. “Money Laundering” hanya diperlukan dalam hal uang yang tersangkut dalam jumlah besar. Bila jumlahnya kecil, uang itu dapat diserap ke dalam peredaran secara tidak kentara. Sebagaimana diketahui, uang kotor itu harus dikonversikan menjadi uang sah sebelum uang itu dapat diinvestasikan atau dibelanjakan, yaitu dengan cara yang disebut “pencucian” (laundering) sebagaimana telah dikemukakan di atas.²⁹

B. Undang Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 15 Tahun 2002.

Ada gejala yang mulai tampak tetapi tetap masih belum dapat dibuktikan secara yuridis bahwa Indonesia mulai diincar sebagai surga bagi praktek “money laundering” (membersihkan uang dari hasil kejahatan). Hal ini disebabkan karena sampai saat ini Indonesia masih juga belum melaksanakan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan mengenai masalah “money laundering”, di samping masih berlaku sangat ketatnya peraturan tentang “rahasia bank”. Walaupun saat ini sudah ada Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 15 Tahun 2002, namun belum juga dapat

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*

diimplementasikan dengan baik, entah mengapa, motivasinya belum juga diketahui. Padahal masalah kejahatan “money laundering” ini bagi sementara pakar hukum (pidana) dan aparat penegak hukum (kepolisian) dapat menjadi potensi yang membahayakan bagi negara Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui, selain ditentukan adanya kemudahan teknologi, komunikasi dan transportasi, juga ditentukan oleh letak geografis negara Republik Indonesia yang berada di persimpangan yaitu antara benua Asia dan benua Australia serta antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis tersebut sebenarnya memudahkan Indonesia menjadi daerah transit untuk ikut dalam perdagangan internasional, tetapi hal tersebut acapkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan “money laundering” yang sudah tentu akan sangat merugikan bangsa dan rakyat Indonesia.

Ada beberapa sebab mengapa Indonesia harus segera melaksanakan undang-undang yang mengatur mengenai larangan dilakukannya pencucian uang ini. Alasan-alasan tersebut telah diuraikan di sana sini oleh beberapa pakar dan dalam hal ini, menurut Sutan Remy Sjahdeini, dapat diringkas sebagai berikut :

1. Praktek-praktek pencucian uang sangat merugikan masyarakat, karena :
 - a). Pencucian uang atau “money laundering” memungkinkan para penjahat atau organisasi-organisasi kejahatan untuk dapat memperluas

- kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya.
- b). Meningkatnya kegiatan kejahatan yang berupa perdagangan narkoba dapat meningkatkan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau para pecandu narkoba, yang notabene biaya tersebut pada akhirnya menjadi beban negara yang memperoleh dana untuk pembiayaan itu dari pajak yang dibayar oleh masyarakat.
 - c). Kegiatan pencucian uang atau “money laundering” mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan (financial community) sebagai akibat dari demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Disamping itu, potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.
 - d). Pencucian (laundering) mengurangi pendapatan Pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.
 - e). Mudah-mudahan uang masuk ke suatu negara telah menarik unsur yang tidak diinginkan melalui perbatasan negara tersebut, menurunkan tingkat kualitas hidup dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional negara yang bersangkutan.³⁰

2. Mengingat pemberantasan pencucian uang dapat mengikis berbagai macam kejahatan yang menghasilkan “dirty money” atau uang haram yang menjadi obyek pencucian uang, seperti misalnya korupsi, perdagangan narkoba, perjudian dan yang lainnya, maka pemberantasan

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Makalah pada Sosialisasi RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di Jakarta, 2000, hal. 2.

pencucian uang sudah menjadi kepedulian dari sebagian besar negara di dunia.

3. Pemberantasan pencucian uang oleh negara-negara yang memiliki kepedulian terhadap pemberantasan pencucian uang telah dilakukan dengan cara melakukan kerjasama internasional di antara negara-negara tersebut.
4. Pada bulan Desember 1988 "Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices" yang didirikan oleh "Group of Ten Central Bank Governors" pada tahun 1974 dan berkedudukan di Basle (Swiss), telah dikeluarkan "Statement on Prevention of Criminal Use of The Banking System for The Purpose of Money Laundering". Statement tersebut berisi "ethical principles" yang harus dianut oleh pimpinan bank-bank (banks management), termasuk sudah barang tentu Indonesia.
5. Apabila Indonesia tidak segera melaksanakan undang-undang mengenai larangan pencucian uang ini dalam arti menindak para pelaku money laundering, maka Indonesia akan menghadapi "international pressure" atau tekanan internasional dan dikucilkan dari pergaulan internasional, karena dianggap tidak ikut memberikan kepedulian terhadap pemberantasan pencucian uang.³¹

Di samping hal-hal tersebut di atas, berdasarkan laporan yang dibuat oleh "Financial Action Task Force" (FATF),

³¹ Ibid.

belum lama ini, Indonesia telah dimasukkan ke dalam “daftar hitam” negara yang dianggap tidak bekerja sama atau tidak kooperatif (non-cooperative countries and territories / NCCT) dalam memberantas praktek pencucian uang haram (money laundering). Selain Indonesia, ada lima negara lagi yang juga ditambahkan sebagai negara yang dianggap tidak bekerja sama, yaitu Mesir, Guatemala, Hongaria, Myanmar, dan Nigeria. Dengan masuknya Indonesia dan negara-negara tersebut, saat ini ada 13 negara yang menjadi anggota “daftar hitam”, termasuk Cook Island, Dominika, Israel, Lebanon, Marshall Island, Nauru, Niue, Filipina, Rusia, St. Kitts dan Nevis, serta St. Vincent dan kepulauan Granada.³²

Dengan demikian implikasi dari terdaftarnya Indonesia dalam daftar yang memprihatinkan itu akan membuat banyak persoalan dan berdampak negatif bagi performa kita di mata lembaga keuangan internasional, misalnya transaksi keuangan / perbankan internasional yang dilakukan oleh perbankan nasional akan terganggu, mengingat bank-bank asing akan sangat berhati-hati dengan bank-bank di Indonesia. Salah satu dampak yang dapat muncul adalah L/C yang diterbitkan perbankan nasional bisa ditolak oleh bank-bank di luar negeri. Juga demikian halnya bila ada perusahaan Indonesia yang bermaksud mencari pinjaman dari bank-bank di luar negeri juga akan mengalami kesulitan.

³² Elvyn G. Masassya, “Melawan Praktek Pencucian Uang”, Suara Pembaharuan, 2 Juli 2001.

Bahkan lebih dari itu, perbankan di Indonesia akan sangat rendah kredibilitasnya di mata investor asing karena dianggap membantu atau paling tidak, kurang dapat bekerja sama untuk memberantas money laundering. Jika hal ini terkemukakan, maka jelas proses perbaikan ekonomi nasional bukan saja terganggu, bahkan akan sulit untuk terealisasi.³³

Di sisi lain, pihak bank dan lembaga-lembaga keuangan juga sangat khawatir, karena jangan-jangan dengan dibentuknya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian ini, akan mengakibatkan penanam modal enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia, karena akan diusut asal usul modalnya. Namun kekhawatiran itu sebenarnya hanya bersifat sebelah sisi saja, karena hanya melihat sisi masuknya modal ke dalam negeri tanpa melihat sebaliknya dari sisi yang lain, yaitu larinya uang atau modal ke luar negeri dari hasil kejahatan di Indonesia seperti korupsi, penyelundupan, perdagangan narkoba dan psikotropika serta kejahatan lainnya yang pasti juga harus diperhatikan.³⁴

Dalam pemberitaan di media massa akhir-akhir ini, banyak dijumpai berita-berita mengenai korupsi, narkoba, kredit macet, yang mengakibatkan negara mengalami

³³ *Ibid.*

³⁴ Andi Hamzah, Peranan Hukum Nasional dalam memberantas Money Laundering, BPHN, Jakarta, 1999, hal. 53.

kerugian, bukan hanya dalam hitungan ratusan juta, melainkan trilyunan rupiah, uang itu entah dibawa ke mana. Dikhawatirkan uang-uang hasil kejahatan tersebut di atas telah dilarikan ke luar negeri dan ditanam di tempat-tempat yang "aman". Oleh karena itu jika Indonesia tidak memiliki peraturan maupun ketentuan lain yang menunjang Undang-Undang Money Laundering, seperti misalnya undang-undang tentang transfer uang ke luar negeri serta perjanjian saling membantu dengan negara-negara lain, maka negara Indonesia menurut sementara pengamat / pakar kemungkinan besar lama kelamaan akan hancur dengan sendirinya.

Untuk diketahui, negara-negara yang telah membuat undang-undang yang saling membantu (mutual assistance act) dan yang diikuti dengan perjanjian antar negara untuk menyita uang hasil kejahatan yang dilarikan ke luar negeri adalah Amerika Serikat dengan Kanada. Dalam perjanjian mereka itu dinyatakan bahwa masing-masing pihak akan menyita uang hasil kejahatan yang dilarikan ke negara mereka dan akan mengembalikannya ke negara asal. Dan untuk merangsang pihak-pihak untuk menyita uang hasil kejahatan itu, maka pihak yang menyita dapat mengambil separuh dari uang sitaan tersebut untuk negaranya dan separuh yang lain dikembalikan ke negara asal.³⁵

Menanggapi hal-hal tersebut di atas, maka Bank Indonesia (BI) sejak tanggal 18 Juni 2001 telah mengeluarkan

³⁵ *Ibid.*

suatu aturan yaitu Peraturan BI (PBI) Nomor 3/10/2001, sebagai petunjuk teknis bagi semua bank yang beroperasi di Indonesia, mengenai pencucian uang untuk mencegah praktek pencucian uang atau “money laundering”. Aturan itu dimaksudkan untuk mendorong bank-bank untuk lebih mengenal nasabahnya (know your customer principle) dan mewaspadaikan kemungkinan terjadinya transaksi yang mencurigakan. Jadi dengan adanya aturan tersebut bank-bank wajib melapor ke Bank Indonesia bila mendapati transaksi yang dirasa mencurigakan dalam rekening nasabahnya. Dan menurut Deputy Gubernur BI, Achjar Ilyas, walaupun nantinya sudah ada undang-undang yang resmi tentang “money laundering”, tetapi PBI ini tetap tidak akan dicabut, karena PBI bisa membantu secara operasional, karena menyangkut aspek “prudential regulation” bagi bank.³⁶

Memang beberapa waktu yang lalu Pemerintah telah mengundang Undang-Undang perihal money laundering dengan DPR. Tetapi sampai saat ini tidak jelas sudah sampai di mana tahap realisasinya. Ada yang mengatakan, lambannya Pemerintah dan DPR membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tersebut karena minimnya pemahaman wakil rakyat mengenai praktek pencucian uang. Ada pula yang mengatakan, bahwa Pemerintah dan DPR lebih sibuk terhadap hal-hal yang lebih “konkret”. Namun ada pula

³⁶ Suara Pembaharuan, “BI Keluarkan Aturan Soal Pencucian Uang”, Jakarta, 27 Juni 2001.

yang mencurigai bahwa kelambatan itu disebabkan karena adanya kalangan tertentu yang memiliki banyak uang ilegal telah melakukan lobby terhadap Pemerintah dan DPR agar tidak cepat-cepat membentuk PPATK. Tetapi ada beberapa kalangan yang lebih ekstrim lagi dengan menuduh anggota DPR enggan mempercepat proses pelaksanaan peraturan itu karena akan menjadi seperti “menepuk air di dulang terpercik muka sendiri”. Maksudnya ialah kalau PPATK itu dibentuk, maka bukan tidak mungkin kalangan anggota Pemerintah dan atau DPR juga akan ikut terjerat. Mungkin hal ini dapat menjadi pertimbangan, mengingat sampai saat ini masih ada para pejabat negara itu yang belum menyerahkan formulir keterangan mengenai harta kekayaan mereka kepada Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN). Yang jelas, sampai saat ini Indonesia memang belum membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang kuat dan komprehensif untuk menindak money laundering.³⁷

Dalam KUHP memang tidak ditulis secara hitam putih tentang money laundering atau tindak pidana pencucian uang ini. Namun dalam Rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Baru), hal ini juga telah dibicarakan. Untuk itu telah dirumuskan dalam Bab XXXI dengan judul Tindak Pidana Pemudahan, di mana masalah money laundering diatur dalam Pasal-Pasal 610 dan 611 Rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Baru) sebagai berikut.

³⁷ Elvyn G. Masassya, *op.cit.*

Pasal 610 Rencana KUHP (Baru)

Barangsiapa menyimpan uang di bank atau di tempat lain, mentransfer, menitipkan, menghibahkan, menginvestasikan, membayar uang atau kertas bernilai uang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, diperoleh dari perdagangan narkoba yang tidak sah atau tindak pidana ekonomi atau tindak pidana korupsi, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak kategori V.

Pasal 611 Rencana KUHP (Baru)

Barangsiapa menerima untuk disimpan atau sebagai titipan, menerima transfer, menerima hibah, menerima sebagai modal investasi, menerima sebagai pembayaran uang atau kertas bernilai uang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, diperoleh dari perdagangan narkoba yang tidak sah atau tindak pidana ekonomi atau tindak pidana korupsi, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak kategori V.

Tetapi ada baiknya pula disimak penjelasan dari kedua pasal tersebut di atas yang dituangkan dalam Penjelasan Rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Baru), sebagai berikut.

Penjelasan Pasal 610 Rencana KUHP (Baru).

Hasil (dapat berupa uang atau kertas bernilai uang) perdagangan narkoba yang tidak sah, tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi sering disembunyikan dengan cara menyalurkannya ke dalam lalu lintas uang dan perdagangan yang sah agar tidak diketahui sumber asalnya (yaitu suatu tindak pidana). Pasal ini bertujuan untuk mencegah seseorang, baik pelaku tindak pidana yang bersangkutan maupun muasa (sic!) atau

perantaraannya, melakukan perbuatan tersebut di atas yang dikenal dengan istilah “money laundering” atau “pencucian uang haram”. Tindak pidana ini dapat menjadi tindak pidana internasional bagi Indonesia, khusus untuk tindak pidana narkoba, apabila negara kita meratifikasi Konvensi Internasional yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 611 Rencana KUHP (Baru).

Pasal ini adalah sama dengan pasal 610 sebelumnya, akan tetapi di sini yang diancam pidana, sebagai seorang pelaku, orang yang menerima penyaluran “uang haram” tersebut ke dalam lalu lintas uang dan perdagangan yang sah dengan tujuan menyembunyikan asal usul uang atau kertas bernilai uang tersebut. Pelaku ini dapat berupa bank, lembaga keuangan non bank, perusahaan pada umumnya maupun perorangan.

Selanjutnya akan dikupas lebih lanjut mengenai Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 15 Tahun 2002. Namun sebelumnya, ada baiknya dilihat terlebih dahulu latar belakang dibuatnya Undang-Undang ini.

Penyusunan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini merupakan salah satu perwujudan politik hukum nasional, yakni untuk menciptakan atau membentuk hukum baru. Sejalan dengan itu agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang juga dilakukan oleh berbagai negara berdasarkan kesepakatan antar bangsa dapat segera direalisasikan. Di hadapan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada pertengahan Juni 2001, Pemerintah telah memberikan

keterangan mengenai pokok-pokok pikiran yang melandasi penyusunan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:

Pertama, bahwa kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan dana dalam jumlah yang besar, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi cenderung makin meningkat, dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, bangsa dan negara;

Kedua, bahwa untuk meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang telah menimbulkan kerugian bagi negara atau perekonomian negara dan masyarakat, perlu suatu undang-undang yang dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegak hukum untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selain itu dengan adanya undang-undang tersebut juga diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat;

Ketiga, bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah menjadi kesepakatan bersama antara berbagai negara untuk mengambil langkah-langkah yang riil, antara lain dengan membentuk undang-undang nasional bagi masing-masing negara;

Keempat, bahwa Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berkaitan dengan berbagai undang-undang yang mungkin pengaturannya akan saling berkaitan, yakni antara lain dengan Undang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang tentang Pasar Modal, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga perlu adanya kekhususan yang perlu ditegaskan agar undang-undang dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan;

Kelima, bahwa pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan penanganan khusus dan profesional dari penegak hukum, sehingga perlu adanya lembaga yang independen, yang bebas dari campur tangan Lembaga Negara, Penyelenggara negara dan pihak manapun.³⁸

Hal tersebut di atas diperjelas dengan pernyataan sebagaimana yang terlihat pada pokok-pokok pikiran dan pokok materi muatan, terutama dalam pembukaan di dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menentukan sebagai berikut: Menimbang :

- a. bahwa kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar semakin meningkat, baik kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah negara Republik Indonesia maupun yang melintasi batas wilayah negara;
- b. bahwa asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut, disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara yang dikenal sebagai pencucian uang;
- c. bahwa perbuatan pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi sehingga stabilitas perekonomian nasional dan keamanan negara terjaga;
- d. bahwa pencucian uang bukan saja merupakan kejahatan nasional tetapi juga kejahatan transnasional, oleh karena itu harus diberantas, antara lain dengan cara melakukan kerja sama

³⁸ Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Keterangan Pemerintah di hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta, Juni 2001.

regional atau internasional melalui forum bilateral atau multilateral;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sedangkan tentang pengertian umum dari money laundering itu sendiri, dicantumkan dengan jelas dalam Bab II Pasal 3 butir a sampai dengan butir h Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai berikut :

- a. menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- b. mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- c. membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- d. menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- e. menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- f. membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;

- g. menukarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya; atau
- h. menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini sebelum disahkan menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 15 Tahun 2002, sudah beberapa kali mengalami perubahan dan disempurnakan dalam interaksi antara Pemerintah dengan DPR-RI. Dan kemudian menghasilkan yang terakhir ini, yang terdiri X (sepuluh) Bab dan 46 (empat puluh enam) Pasal.

Beberapa materi muatan dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana pencucian Uang, secara garis besar terdiri dari :

1). Kategori Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana.

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai 15 (lima belas) tindak pidana seperti terlihat dalam Pasal 2, yang merupakan tindak pidana pencucian uang, yaitu antara lain sebagai hasil dari korupsi, penyuapan, penyelundupan, tindak pidana yang berkaitan dengan perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan budak / wanita / anak, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan dan penipuan baik dilakukan di dalam atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

2). Alat Bukti.

Dalam Undang-Undang ini, ditentukan bahwa alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diperluas. Alat bukti yang sah dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang tersebut dicantumkan dalam Pasal 38, yaitu :

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, yang menyebutkan bahwa dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - a). tulisan, suara, atau gambar;
 - b). peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 - c). huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

3). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dalam Undang-Undang ini khususnya dalam Bab V Pasal 18 sampai dengan Pasal 29 ditentukan mengenai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yaitu lembaga independen yang dibentuk dalam rangka

mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, yang terdiri atas seorang kepala dengan dibantu oleh paling banyak 4 orang wakil kepala yang mempunyai tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, yaitu :

- a. mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan Undang-Undang ini;
- b. memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;
- c. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan;
- d. memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- e. mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;
- f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- g. melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;
- h. membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Namun demikian, dalam hal diperlukan dapat dibuka kantor perwakilan PPATK di daerah. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah untuk melakukan pemantauan atau kerja sama dengan aparat penegak hukum di daerah tersebut.

Badan ini bebas dari campur tangan Lembaga Negara, Penyelenggara Negara dan pihak lain. PPATK juga dapat bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, atau pihak polisi internasional (Interpol). Selain bekerja sama dengan penegak hukum lainnya, Komisi dapat juga bekerja sama dengan instansi terkait seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Disamping itu, PPATK juga bekerja sama dengan negara lain, baik kerja sama regional maupun internasional melalui forum bilateral atau multilateral sehingga usaha pencegahan atau pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat lebih efektif dilaksanakan.

4). Hukum Acara Pidana.

Dalam Undang-Undang ini pada Bab VI Pasal 30 sampai dengan 38, diatur secara khusus mengenai hukum acara pidana baik penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Sebagaimana lazimnya, sebaiknya tindak pidana khusus seperti "money

laundering” membutuhkan hukum acara yang khusus pula, dan oleh karena itu tidak digunakannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kecuali kalau tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Money Laundering, maka barulah KUHP bisa digunakan.

5). Perbedaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ada beberapa perbedaan antara Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan KUHP, yang dapat dicatat di sini antara lain, yaitu :

a. Pengenaan Batas Maksimum dan Minimum Pidana.

Dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini, diatur pula mengenai pengenaan batas maksimum dan minimum pidana. Selama ini, berdasarkan KUHP pengenaan batas pidana hanya bersifat maksimum.

b. Percobaan, Pembantuan dan Permufakatan jahat.

Dalam Undang-Undang ini pula khususnya Pasal 3 butir 2, diatur mengenai percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat, dengan penjatuhan pidana disamakan dengan pelaku tindak pidana pencucian uang. Sedangkan dalam KUHP, mengenai materi tersebut mempunyai gradasi dan penjatuhan pidana yang berbeda antara pelaku dan orang yang membantu.

c. Perluasan Yurisdiksi.

Dalam Undang-Undang ini, seseorang yang berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang sifatnya hanya membantu atau memberi kesempatan terjadi tindak pidana pencucian uang, juga dapat dikenai penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana tersebut sama dengan pelakunya.

6). Rahasia Bank

Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, maka penyidik, penuntut umum atau hakim dapat meminta keterangan mengenai keuangan seorang nasabah. Namun, sebelum hal tersebut dilakukan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Ketentuan ini merupakan pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank dalam undang-undang tentang perbankan.

7). Perlindungan bagi Pelapor dan Saksi

Bagi pelapor dan saksi, undang-undang ini memberikan perlindungan khusus. Perlindungan terhadap pelapor dan saksi dapat berupa perlindungan terhadap ancaman yang membahayakan jiwa atau keluarga, dengan tidak menyebutkan identitas pelapor atau saksi dalam sidang pemeriksaan di pengadilan.

8). Kerjasama Internasional

Ketentuan ini membuka kesempatan bagi penegak hukum untuk bekerja sama dengan penegak hukum di negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral. Ketentuan ini dimaksudkan agar penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan dapat berjalan lancar.³⁹

Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 15 Tahun 2002 ini diperkirakan akan memakan banyak “korban” dalam pelaksanaannya. Sebab perlu diketahui bahwa seorang pelaku pencucian uang dapat diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun. Selain itu mereka juga bakal dikenakan pidana denda yang cukup besar. Di pihak lain, ancaman pidana tersebut juga bisa mengenai orang-orang maupun korporasi yang menerima atau menguasai dana haram tersebut. Yang harus juga dipikirkan adalah kemungkinan adanya pelarian modal padahal Indonesia masih banyak membutuhkan arus investasi yang masuk di tengah porak porandanya perekonomian kita. Hal ini jelas merupakan risiko besar yang harus siap diterima dari pemberlakuan Undang-Undang tersebut. Hal menarik lain dari Undang-Undang tersebut adalah karena di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang telah

³⁹ Departemen Kehakiman dan Hal Asasi Manusia, *loc. cit.*

dimasukkan alat bukti baru seperti dokumen dan “electronic transfer”, faksimili, email, dan lain-lainnya, yang tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Berdasarkan alat bukti baru ini maka diharapkan efektivitas dari pemberantasan money laundering di Indonesia dapat berhasil dan tidak perlu menunggu terlebih dahulu sampai disiapkan apa yang dinamakan “Cyber law”.⁴⁰

Ada sementara pendapat menyatakan bahwa terlalu dini untuk berharap Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang baru saja diundangkan ini bakal dapat berfungsi dengan efektif. Kerjasama dengan berbagai institusi, terutama institusi keuangan dan perbankan akan menjadi kunci utama yang sangat efektif. Soalnya sampai saat ini, mencuci uang melalui institusi keuangan dianggap sebagai jalan terbaik dan teraman. Bank yang berhati-hati dan mengindahkan pesan dari Bank Indonesia yaitu “kenalilah nasabahmu”, akan dapat mempersulit proses pencucian uang. Meskipun demikian ada pula sementara pendapat yang percaya bahwa sikap optimisme perlu dipertahankan. Bersikap pesimistis hanya akan membunuh semangat. Bagaimanapun, kelahiran Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jelas sudah merupakan suatu kemajuan besar dalam sistem hukum nasional kita.

⁴⁰ Romli Atmasasmita, Money Laundering dan Kebijakan Legislasi, Seminar Money Laundering dan Cyber Crime dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia, Surabaya, Februari 2001.

C. Problematik Korupsi Di Indonesia.

Korupsi adalah suatu kekuatan jahat yang mampu menghancurkan suatu bangsa. Sejarah di pelbagai bagian di dunia telah memperlihatkan kenyataan itu. Lihat saja kerugian yang ditimbulkannya, terutama pada negara-negara berkembang, sehingga tidaklah mengherankan bila korupsi dikatakan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime). Berbicara masalah korupsi ini memang tidak akan ada habis-habisnya.

Perkembangan korupsi selama lebih dari 30 tahun terakhir ini memang makin menggelisahkan. Perbuatan dan dampak korupsi memang telah sedemikian mengganggu ketentraman dan kedamaian bangsa dan rakyat Indonesia. Misalnya, kasus dari mantan Presiden Soeharto di zaman Orde Baru, yang oleh sementara orang dan mass media diduga telah melakukan korupsi dalam masa kepemimpinannya memimpin negara Indonesia. Bahkan menurut sementara berita di media pers, dikabarkan konon keluarga Cendana yaitu keluarga mantan Presiden kedua Republik Indonesia itu, memiliki harta kekayaan yang berlimpah ruah baik di dalam maupun di luar negeri. Ironis memang, kalau hal yang demikian itu benar, di saat Indonesia tertatih-tatih untuk keluar dari kemelut perekonomian yang porak poranda, mantan pemimpin negara yang katanya melakukan korupsi dan melarikan uangnya ke luar negeri,

justeru belum dapat diproses sesuai rambu-rambu hukum dan diadili. Itulah korupsi !

Korupsi berasal dari bahasa Latin “*corruptio*”, yang kemudian dialihkan ke banyak bahasa di Eropa seperti dalam bahasa Inggris disebut “*corruption, corrupt*”. Belanda menyebutnya “*corruptie*” (*korruptie*). kemudian orang Indonesia mengatakannya “*korupsi*” yang secara harafiah berarti kerusakan, keburukan, kebobrokan, dan kata-kata lain atau ucapan yang tidak bermoral. Di samping itu perkataan korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk.⁴¹ Menurut kamus hukum yang paling populer di Amerika Serikat yaitu *Black’s Law Dictionary* ditulis bahwa pengertian korupsi adalah :

*An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others.*⁴²

Korupsi merupakan masalah yang amat sensitif untuk dibicarakan, apalagi kalau dikaitkan dengan nama orang, terlepas dari asas praduga tak bersalah yang masih harus dibuktikan di pengadilan. Masalah korupsi ada di mana-mana di dunia ini dan eksistensinya pun sudah ada sepanjang

⁴¹ Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, BPKP, Jakarta, Maret 1999, hal.270.

⁴² Henry Campbell Black, “*Black’s Law Dictionary*”, Sixth Edition, West Publishing, St. Paul, Minnesota, 1990.

sejarah. Korupsi tidak saja dapat ditemukan di negara-negara berkembang, bahkan di negara adidaya seperti Amerika pun mengalaminya.

Berdasarkan hasil survei dari lembaga kajian isu regional yang berbasis di Hongkong, yaitu "Political and Economic Risk Consultancy" (PERC) pada bulan Maret 2001, dijelaskan bahwa Indonesia menempati urutan kedua, setelah Vietnam, sebagai negara terkorup di kawasan Asia. Selain itu PERC menyimpulkan pula, bahwa Indonesia dalam kurun waktu empat tahun terakhir ini menunjukkan indikasi tidak adanya usaha perbaikan yang mendasar dalam menangani pemberantasan dan penindakan persoalan korupsi.⁴³

Persoalan pemberantasan korupsi yang terjadi dewasa ini di Indonesia bukanlah hanya persoalan hukum dan penegakan hukum semata-mata. Korupsi juga merupakan persoalan kultural, sosial, ekonomi dan psikologi-sosial yang sungguh sangat parah dan sama parahnya dengan persoalan hukum sehingga wajib dibenahi secara simultan. Dikatakan bahwa korupsi juga merupakan persoalan sosial-ekonomi karena adanya kejahatan korupsi mengakibatkan tidak adanya pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat dan juga merupakan persoalan psikologi sosial karena korupsi merupakan penyakit sosial yang kalau boleh dikatakan sudah turun temurun dalam kehidupan bermasyarakat dan memang

⁴³ Adnan Buyung Nasution, Prinsip-Prinsip Umum Pengadilan Korupsi, Makalah pada Seminar Koalisi untuk Pengadilan Anti Korupsi, Jakarta, Juni 2001.

sangat sulit untuk disembuhkan, karena menyangkut moral dari masyarakat itu sendiri.⁴⁴

Tuntutan penuntasan perkara korupsi di Indonesia yang sudah digolongkan ke dalam pelanggaran hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia sudah sedemikian parah, karena nilai kuantitatif kerugian negara, termasuk kesengsaraan seluruh rakyat, sudah melampaui batas-batas toleransi baik dilihat dari sisi moral, etika, kesusilaan, maupun secara hukum. Secara kualitatif, korupsi juga sudah menimbulkan kerugian immaterial berupa bobroknya moral sebagian besar penyelenggara negara, termasuk di dalamnya aparat penegak hukum, yang jika dibiarkan dapat menghasilkan generasi pemimpin yang tidak lagi dekat dan memahami kepentingan dari rakyat banyak.⁴⁵

Tidaklah mengherankan apabila dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi ini, telah banyak dilakukan pemberlakuan berbagai ketentuan perundang-undangan baik di masa kini maupun di waktu yang lampau. Sejumlah peraturan yang pernah diberlakukan, antara lain adalah :

1. Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957;
2. Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/08/1957;

⁴⁴ Romli Atmasasmita, Perspektif Pengadilan Korupsi, Makalah pada Seminar tentang Pengadilan Korupsi, Jakarta, Juni 2001.

⁴⁵ Romli Atmasasmita, "Masalah Pemutihan Uang Hasil Korupsi", Media Indonesia, Jakarta, 31 Mei 2001.

3. Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/011/1957;
4. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958;
5. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Laut Angkatan Laut tanggal 17 April 1958 No. Prt/Z.1/I/7;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tertanggal 9 Juni 1960;
7. Keputusan Presiden No. 228 Tahun 1967 mengenai Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi;
8. Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1970 tanggal 31 Januari 1970 tentang Pembentukan Komisi-4;
9. Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1970 tanggal 31 Januari 1970 tentang Pengangkatan Dr. Mohammad Hatta sebagai Penasihat Presiden;
10. Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1970 tanggal 3 Agustus 1970 tentang Pendaftaran Kekayaan Pribadi Pejabat Negara / Pegawai Negeri / ABRI;
11. Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1971 tanggal 3 Agustus 1971 tentang Laporan Para Pejabat Negara / Pegawai Negeri / ABRI Mengenai Kewajiban Membayar Pajak-Pajak Pribadi;
12. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 29 Maret 1971.⁴⁶

Daftar di atas akan lebih panjang lagi apabila disertakan juga sejumlah peraturan lain di berbagai bidang yang dibuat di berbagai lembaga negara mengenai korupsi. Namun titik berat yang ingin dikemukakan adalah bahwa secara substantif, ketentuan tentang korupsi tidak pernah lekang dari dunia

⁴⁶ Harkristuti Harkrisnowo, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Makalah pada Seminar Badan Anti Korupsi, Jakarta, Juli 2001, hal 1.

perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi ternyata tidak satupun yang berhasil untuk mengerem dilakukannya korupsi di Indonesia.⁴⁷

Demikian pula halnya dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Yang kemudian diamandemenkan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan dilakukannya revisi atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi, karena terlihat dalam latar belakang pembukaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagai berikut :

- a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

⁴⁷ *Ibid.*

membentuk Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Konsiderans seperti di atas ini sesungguhnya bukan suatu fenomena baru ataupun indikator baru, bahkan secara substansial merupakan pengulangan dengan kata-kata yang berbeda. Dalam realitanya, kasus-kasus korupsi yang terjadi, khususnya dalam tiga tahun terakhir ini ternyata sangat sulit untuk dijerat ke dalam hukum pidana, sehingga muncullah sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa “Indonesia adalah negara yang sangat tinggi korupsinya namun tidak ada atau tidak dapat ditemukan koruptornya”.⁴⁸

Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diatur dalam Pasal 2 yang menyebutkan :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Walaupun sanksi dalam undang-undang ini sudah diperberat, namun tampaknya korupsi tetap saja terus berjalan. Pelaku

⁴⁸ *Ibid.*, hal.4.

korupsi memang bukan orang sembarangan dibandingkan dengan pelaku tindak pidana biasa, karena korupsi biasanya dilakukan oleh pelaku yang mempunyai akses dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya.

Jadi memang benar bahwa pemahaman dan kesadaran umum rakyat Indonesia terhadap bahayanya tindak pidana korupsi telah dituangkan dalam sejumlah peraturan, seperti Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang selanjutnya Tap MPR tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam 2 (dua) Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diamandemenkan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan direvisinya Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi ini diharapkan dapat cukup ampuh untuk menyeret para pelaku kejahatan korupsi karena sejumlah koruptor besar dan orang-orang yang membantu terjadinya tindak pidana korupsi ini masih bebas bergentayangan dan belum mendapat pidana yang setimpal dengan perbuatannya, padahal akibat yang ditimbulkannya telah menimbulkan kesengsaraan dan kemerosotan perekonomian bagi kelangsungan hidup baik rakyat maupun negara Indonesia.

Perubahan yang dilakukan pada Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999, yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, yang pada hakekatnya melakukan perubahan-perubahan sebagai berikut.

1. Diatur mengenai perluasan alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk yang merumuskan bahwa “petunjuk” selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks dan faksimili, serta dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna;
2. Perlu ditambahkannya ketentuan mengenai “pembuktian terbalik” atau “omkering van de bewijslast” / “shifting the burden of proof” yaitu pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa, serta sebagai ketentuan yang bersifat

“premium remedium” dan sekaligus mengandung sifat preventif khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Sebaiknya “pembuktian terbalik” ini tidak diberikan kepada kepolisian dan atau kejaksaan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan. Jadi hanya akan dilimpahkan atau diberikan kepada pengadilan agar diterapkan secara obyektif, transparan, serta dengan penuh tanggung jawab.

Pembuktian terbalik ini dikhususkan pada tindak pidana baru tentang “pemberian” yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “gratification” dan terhadap “perampasan” harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu dakwaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

3. Dalam undang-undang ini diatur pula mengenai perampasan yang dapat dilakukan terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan

atau tersembunyi tersebut adalah harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam hal demikian, negara diberikan hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk Komisi Pemberantasan Korupsi, jaksa, instansi yang dirugikan atau kuasa yang ditunjuk untuk mewakili negara.

4. Unsur penting yang juga dimasukkan dalam undang-undang ini yaitu ditambahkannya Ketentuan Peralihan. Ketentuan Peralihan ini pada dasarnya sesuai dengan asas hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu apabila tindak pidana dilakukan sebelum ketentuan pidana tersebut diubah, sehingga mengenai tindak pidana tersebut terdapat dua ketentuan undang-undang, yaitu undang-undang yang lama dan yang baru, maka dipilih yang paling menguntungkan bagi terdakwa.⁴⁹

Perubahan seperti tersebut di atas, diharapkan dapat mengisi kekosongan atau celah pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang selama ini dimanfaatkan oleh para koruptor untuk menghindari jerat hukum. Yang harus disambut dengan gembira dalam perubahan Undang-Undang

⁴⁹ *Ibid.*

Nomor 20 Tahun 2001 ini adalah dicantumkannya aturan peralihan yang diletakkan dalam Bab VI A tentang Ketentuan Peralihan, terutama Pasal 43 B yang memuat ketentuan sebagai berikut :

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 287, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425 dan Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9), Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku.

Namun yang harus dipikirkan lebih lanjut, bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia agar berhasil, harus dimulai dengan membentuk Penuntut Umum Khusus untuk Korupsi. Demikian pula secara mutatis mutandis harus dibentuk pula suatu Pengadilan Khusus untuk Korupsi. Contoh untuk mendukung hal tersebut yaitu telah dibentuknya Pengadilan Niaga.

D. Hubungan Money Laundering dan Korupsi

Sudah banyak sekali buku dan tulisan lain yang menganalisis sebab musabab korupsi, modus operandinya, kekuatan-kekuatan kultural, sosial dan politik yang mendukung dan yang memerangnya maupun memberi saran untuk memberantas binatang jalang yang bernama korupsi ini. Kali ini, penulis mencoba memandang korupsi bertalian dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang atau "Money Laundering" yang di Indonesia baru saja diundangkan tahun 2002 ini dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, karena menurut undang-undang tersebut, korupsi merupakan salah satu unsur adanya kejahatan "money laundering" atau tindak pidana pencucian uang.

Menurut Loebby Loqman, sebenarnya ketentuan tentang Pencucian Uang ini dapat berdampak positif dalam penanggulangan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kalau dilaksanakan dengan baik dan konsekuen sesuai tujuannya, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini amat berguna di dalam menanggulangi korupsi, karena setiap bank atau lembaga keuangan wajib dengan teliti memeriksa dari mana datangnya uang nasabah yang akan disimpan di bank atau lembaga keuangan tersebut. Bank sebagai penerima uang wajib menaruh kecurigaan apabila ada seseorang atau nasabahnya yang datang dan memberikan

sejumlah uang yang kiranya tidak sesuai dipunyai oleh orang tersebut.⁵⁰

Suatu contoh, misalnya ada seorang pegawai negeri yang bukan eselon atas yang akan mendepositokan uangnya sejumlah milyaran rupiah. Memang bukan tidak mungkin seorang pegawai negeri mempunyai uang bermilyar-milyar, akan tetapi apabila uang tersebut hanya hasil dari gajinya saja, maka kekayaan tersebut wajib untuk dicurigai. Kalaupun hal ini terjadi, maka bank yang menerima uang itupun dapat dijatuhi sanksi berdasarkan Undang-Undang Money Laundering. Hal seperti yang dimaksudkan di atas pernah terjadi di Amerika dalam rangka penegakan hukum terhadap Undang-Undang Money Laundering yang dilakukan terhadap First National Bank of Boston. Bank tersebut dipersalahkan karena tidak melaporkan adanya transaksi uang tunai yang diperkirakan sebagai uang gelap sejumlah US \$ 1,22 milyar. Bank tersebut akhirnya didenda sebesar US \$ 500.000.⁵¹

Memang ada banyak cara untuk menggunakan atau membelanjakan uang hasil korupsi. Apalagi seperti di Indonesia, yang memiliki budaya kekeluargaan yang amat erat, sehingga mungkin saja uang yang didapat dari hasil korupsi itu sudah dibagi-bagikan kepada saudara-saudaranya, sehingga ketika disimpan di bank, bank tidak

⁵⁰ Loebby Loqman, Tindak Pidana Pencucian Uang, Makalah pada Seminar di Universitas Surabaya, Surabaya, November 2000.

⁵¹ *Ibid.*

menerimanya dalam jumlah yang besar, akan tetapi di terima dari beberapa orang dan dalam jumlah yang tidak terlalu besar.⁵²

Selama ini pemerintah memang tidak pernah bisa menarik uang dari hasil korupsi dalam jumlah yang memadai, karena Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sendiri juga belum berfungsi dengan baik. Lihat saja, ada berapa banyak kasus korupsi yang dilaporkan masuk ke Kejaksaan Agung dibandingkan kasus korupsi yang diselesaikannya serta uang hasil korupsi yang dapat dikembalikan kepada negara.

Menurut Amien Sunaryadi, ketua dari tim Rancangan Undang-Undang Pelaporan Transaksi Keuangan, yang sedang dibuat oleh Kantor Menteri Negara Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam wawancaranya dengan media massa mengatakan bahwa uang hasil korupsi yang bisa diselamatkan untuk negara sangat kecil, paling hanya 5 sampai dengan 10 persen saja, dibandingkan dari hasil korupsi yang sudah dibawa lari entah ke mana. Ironisnya, aparat hukum juga selalu kesulitan melacak ke mana uang hasil korupsi tersebut dibawa pergi. Maling biasanya memang lebih lihai daripada penegak hukum. Atau mungkin juga sang penegak hukum ikut

⁵² *Ibid.*

bermain dan ikut ambil bagian dalam masalah korupsi ini. Hal yang demikian memang sulit untuk dibuktikan secara yuridis dan memang menjadi suatu pergumulan tersendiri. Yang jelas mental dan moral dari aparat penegak hukum juga ikut berperan dan menentukan dalam hal "money laundering" ini.

Meskipun sulit dibuktikan secara yuridis, ada dugaan kuat bahwa ada korelasi atau hubungan antara korupsi dengan "money laundering". Dalam hal ini bank dan lembaga-lembaga keuangan berperan penting di dalamnya, karena uang hasil korupsi biasanya dicuci dalam wadah seperti bank dan lembaga-lembaga keuangan, walaupun tidak menutup kemungkinan melalui cara yang lain. Tuntutan dari masyarakat agar kasus-kasus korupsi segera diusut tuntas harus benar-benar diperhatikan dan ditindaklanjuti. Negara sudah dirugikan bermiliar-miliar rupiah akibat korupsi dan sistem perekonomian sudah sampai dalam taraf yang sangat memprihatinkan.

Dalam kondisi yang demikian, maka sudah selayaknya Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini segera direalisasikan dengan sungguh-sungguh oleh aparat penegak hukum, karena bila dilaksanakan dengan konsekuen, paling tidak dengan segera Pemerintah harus membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan, dengan demikian diharapkan dapat menghambat

larinya uang hasil korupsi dan mengembalikan stabilitas ekonomi pada porsi yang sebenarnya.

Perlu disadari, bahwa bila Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini nanti benar-benar direalisasikan, ia bukanlah solusi final dari maraknya korupsi atau tindak pidana lainnya. Ia hanya sekedar obat, alat atau suatu mekanisme, ibarat sungai hanya dari di sisi hilir, sementara kalau di hulunya sendiri kotoran-kotoran masih terus ditumpuk, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, manipulasi dan pelbagai kejahatan lainnya masih terus berlangsung, maka Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini juga hanya akan menjadi sekedar perangkat hukum formal atau semacam kosmetika belaka.

B A B III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemberantasan Money Laundering di Indonesia

Seperti negara-negara maju lainnya, Indonesia dewasa ini dihadapkan pada berbagai kasus kejahatan, antara lain kejahatan kerah putih (white collar crime), kejahatan terorganisir (organized crime), korupsi, pemalsuan atau penjiplakan hak cipta dan hak milik intelektual, penggelapan pajak, pemalsuan saham, kejahatan komputer, kejahatan perbankan dan yang sedang marak dibicarakan dewasa ini yaitu pencucian uang hasil kejahatan (money laundering).

Semoga masih segar dalam ingatan masyarakat Indonesia tentang berbagai peristiwa yang tidak menyenangkan sampai pada masa berakhirnya Orde Baru. Konon, begitu ramai dibicarakan di media massa bertalian dengan mantan orang nomor satu di Indonesia, yaitu (mantan presiden) Soeharto yang dikabarkan telah mentransfer secara terselubung kekayaan milik rakyat Indonesia ke berbagai bank di luar negeri. Semoga itu berita burung saja. Perlu diingat dan dikemukakan pula ketika deposito bekas Presiden Filipina, Ferdinand Marcos dan isterinya Imelda Marcos yang mempunyai uang sebesar US \$ 1,5 miliar, kemudian dibekukan oleh Bank Credit Suisse pada tahun 1986. Juga kasus mantan Jaksa Agung Andi Muhammad Ghalib yang

konon (entah benar atau tidak) memiliki simpanan di berbagai bank dengan rekening senilai 8,79 miliar rupiah plus US \$ 53,401, serta berita tentang Ny. Rahardi Ramelan yang terpergok tengah membawa uang tunai senilai US \$ 350 ribu di Amerika Serikat.⁵⁵ Jelaslah bahwa semua ini menyangkut sejumlah uang yang sangat besar yang patut dipertanyakan dari mana mereka mendapatkannya. Memang, bukan tidak mungkin bahwa seseorang dapat memiliki uang bermilyar-milyar, namun apabila tidak sesuai dengan gaji dan hasil kerja yang didapatkannya, maka tentu hal itu patut dipertanyakan.

Juga dapat dipertanyakan ketika Indonesia diserbu sejumlah "hedge fund" (pengelola dana) yang dengan agresif berdatangan untuk memborong aset-aset bank yang dikelola oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Ada indikasi kuat bahwa dana tersebut berasal dari hasil kekayaan illegal, yang dimiliki warganegara Indonesia yang selama ini disimpan di luar negeri. Memborong aset yang dilelang oleh BPPN rupanya kini menjadi salah satu wahana dari para pemilik dana illegal untuk mencuci uangnya.⁵⁶

Ichsanuddin Noorsy, Direktur Lembaga Pengkajian Kebijakan Publik, mengatakan bahwa dengan adanya berbagai kasus kejahatan keuangan termasuk "money laundering" yang ada sampai saat ini, ternyata telah

⁵⁵ Majalah SWA, Jakarta, Edisi Juli – Agustus 1999.

⁵⁶ *Ibid.*

merugikan negara kurang lebih sekitar 880 triliun rupiah. Celakanya, akibat dari terjadinya kejahatan keuangan itu, kalau benar, ditanggung sepenuhnya oleh rakyat. Artinya, masyarakat dari kalangan bawah atau yang biasa disebut akar rumput (grass root) yang harus memikul beban berat sebagai akibat dari kejahatan keuangan tersebut. Beban itu ditanggung masyarakat misalnya dalam bentuk kenaikan tarif dan harga barang-barang dan jasa, kenaikan retribusi dan pajak, serta buruknya kualitas pelayanan publik.⁵⁷ Dan hal ini telah terbukti dengan naiknya harga BBM, tarif dasar listrik juga naiknya tarif telepon yang tentunya sangat membebani masyarakat akar rumput. Siapa yang harus disalahkan ?

Indonesia kini memang dianggap sebagai surga “money laundering” seperti halnya Austria, Swiss, kepulauan Cayman, Christmas island, Canary dan kawasan lepas pantai lainnya yang memang sangat ideal karena tidak memperdulikan asal usul dana yang disimpan dan menjaga rahasia bank dengan sangat ketat. Dalam hal ini, Indonesia dapat dikatakan memiliki nilai lebih lainnya, karena selain tidak mempertanyakan asal usul dana dan ketatnya memegang rahasia bank, juga karena penyedia jasa keuangan dalam hal ini kalangan perbankan memberikan bunga yang amat menggiurkan. Jadi tidak heran, walaupun krisis moneter terjadi dan perekonomian Indonesia semakin memburuk,

⁵⁷ Ichsanuddin Noorsy, wawancara di Media Indonesia, Jakarta, 11 Juli 2001.

tetapi masih ada begitu banyak uang yang beredar dan diperdagangkan. Indonesia memang menjadi binatu atau laundry yang ideal bagi uang haram.

Praktek “money laundering” memang mula-mula dilakukan hanya terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan narkoba dan obat-obat lain yang sejenis dengan itu yang acapkali disebut sebagai obat golongan psikotropika. Namun dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan perbankan, “money laundering” kemudian perlu dilakukan pula terhadap uang-uang yang diperoleh dari sumber kejahatan lainnya, misalnya korupsi, penggelapan pajak, penyelundupan, dan lain-lainnya.

Secara umum yang disebut dengan “money laundering” atau yang dalam bahasa Indonesia disebut “pencucian uang” adalah proses pencucian uang dari hasil tindak pidana kejahatan. Bagaimana mengetahui bahwa suatu ‘money laundering’ sudah terjadi ? Hal ini memang sangat sulit diketahui, karena biasanya modus operandi pelaku “money laundering” sangat bervariasi, sesuai dengan kepiawaian masing-masing pelaku, terlebih bila dilakukan di negara yang memiliki peraturan tentang ketatnya rahasia bank. Tetapi paling tidak, ada tiga tahap yang kerap kali dilakukan oleh pelaku “money laundering” untuk mencuci uang yang berasal dari tindak pidana kejahatan. Tahap-tahap itu adalah :

1. Tahap “placement”, yaitu tahap penempatan uang hasil kejahatan pada suatu bank, lembaga keuangan atau

tempat tertentu yang diperkirakan aman untuk sementara waktu.

2. Tahap “layering”, yaitu suatu tahap pelapisan yang berisi kegiatan-kegiatan untuk menghilangkan jejak atau ciri-ciri asli dari uang hasil kejahatan tersebut.
3. Tahap “integration”, yaitu tahap menyatukan uang hasil kejahatan yang telah melalui proses “layering” dalam suatu proses arus keuangan yang sah. Pada tahap ini, uang dari hasil kejahatan itu telah benar-benar bersih dan sulit untuk dikenali atau diklaim sebagai hasil kejahatan.

Perlu juga dicatat bahwa target pelaku “money laundering” adalah negara-negara yang belum melakukan kriminalisasi “money laundering”, yang memungkinkan terjadinya transaksi keuangan secara anonim dan di mana rahasia bank yang ketat dijadikan tempat untuk berlindung, sehingga pelaku dapat terhindar dari jerat hukum.

Dari hasil penelitian di banyak kasus “money laundering”, agaknya sektor perbankan menjadi sasaran atau obyek yang paling sering digunakan oleh para pelakunya. Berdasarkan laporan dari Associated Press, setiap tahunnya tidak kurang dari US \$ 600 miliar uang hasil kejahatan yang diproses dalam lembaga perbankan dan kemudian dikonversikan kembali menjadi dana legal (money laundering). Sementara itu berdasarkan hasil Penelitian Dana Moneter Internasional (IMF), hasil kejahatan pencucian uang melalui bank-bank diperkirakan hampir mencapai US \$ 1.500 miliar

setiap tahunnya. Dana itu berasal dari kegiatan pencucian uang hasil korupsi, obat bius, prostitusi dan kejahatan lainnya.⁵⁸

Mencermati kasus-kasus tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa “money laundering” termasuk dalam apa yang dinamakan White Collar Crime atau yang dalam bahasa Indonesia disebut kejahatan kerah putih, karena sejumlah karakteristik yang pada umumnya melekat pada White Collar Crime, dapat ditemukan pula pada “money laundering”. Sejumlah karakteristik tersebut menurut Hazel Croall dalam bukunya White Collar Crime sebagaimana dikutip oleh Harkristuti Harkrisnowo (2001), adalah sebagai berikut :

- a. tidak kasat mata (low visibility);
- b. sangat kompleks (very complexity);
- c. ketidakjelasan pertanggung jawaban pidana (diffusion of responsibility);
- d. ketidakjelasan korban (diffusion of victims);
- e. aturan hukum yang samar atau tidak jelas (ambiguous criminal law);
- f. sulit dideteksi dan dituntut (weak detection and prosecution).⁵⁹

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa karakteristik kejahatan “money laundering” sangat kompleks dan sulit untuk dilacak keberadaannya.

⁵⁸ Media Indonesia, Jakarta, 16 Juli 2001.

⁵⁹ Harkristuti Harkrisnowo, loc.cit.

Memang ciri khas yang sangat menonjol dari kejahatan pencucian uang ini ialah mobilitas tinggi dengan jaringan organisasi yang sangat tertutup serta didukung manajemen yang profesional dan keuangan yang sangat canggih. Modus operandi yang demikian hanya dapat dilaksanakan dan dilakukan dengan baik oleh suatu organisasi kejahatan (organized crimes). Hal ini berarti bahwa memerangi kegiatan pencucian uang berarti memerangi organisasi kejahatan dengan segala aktivitasnya dan membantu menentukan kredibilitas dunia perbankan.⁶⁰

Jadi dapat dikatakan bahwa perkembangan dalam dunia perbankan, sangatlah bermakna signifikan terhadap kejahatan "money laundering" ini, terutama peran perbankan di luar negeri (foreign and offshore banking). Oleh sebab itu tanpa bantuan dari dunia perbankan, kejahatan "money laundering" dirasakan akan sangat sulit untuk diberantas. Di Indonesia ketentuan tentang rahasia bank (bank secrecy act) merupakan salah satu senjata yang dimanfaatkan oleh para pencuci uang. Betapa tidak, konsep ini sangat menguntungkan mereka dalam mengelola atau menyimpan uang dari hasil kejahatan yang mereka peroleh. Memang "money laundering" menjadi masalah dilematis di bidang hukum, terutama ketika berkaitan dengan prinsip kerahasiaan bank.

⁶⁰ Romli Atmasasmita, *loc.cit.*

Kewajiban bank untuk merahasiakan nasabahnya diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan :

ayat (1) : Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41 A, pasal 42, pasal 43, pasal 44 dan pasal 44 A.

ayat (2) : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

Ada beberapa prinsip yang dapat dikemukakan berkaitan dengan rahasia bank ini, yaitu :⁶¹

1. Rahasia bank ini bernilai normatif dalam bentuk hukum positif yang bersifat memaksa. Sifat memaksa didapat dari perkataan “wajib” yang terdapat pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dasar dari kewajiban bank di sini adalah Undang-Undang. Pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank bukan saja pelanggaran perdata (civil violation), tetapi juga dianggap sebagai pelanggaran pidana (criminal violation) sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
2. Yang harus dirahasiakan oleh bank adalah keterangan tentang nasabah penyimpan dan simpanannya. Keterangan-

⁶¹ Daniel Djoko Tarliman, Pencucian Uang Dalam Perspektif Rahasia Bank, makalah pada Seminar Nasional tentang “Money Laundering”, di Surabaya, Agustus 1999.

keterangan selain yang menyangkut nasabah penyimpan dan simpanannya, seperti keterangan mengenai kredit yang diperoleh, jual beli surat berharga bukan merupakan rahasia bank, karenanya bank tidak berkewajiban untuk merahasiakannya.

3. Rahasia bank tidak bersifat mutlak. Pengecualian-pengecualian terhadap rahasia bank diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu untuk kepentingan perpajakan, kepentingan BUPLN/PUPN, kepentingan peradilan, tukar menukar informasi antar bank dan atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan dan untuk kepentingan ahli waris dari nasabah penyimpan.

Namun sejak Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana pencucian Uang ini diberlakukan, maka bank sebagai lembaga penyedia jasa keuangan tidak dapat lagi atau tidak boleh lagi menyimpan keterangan menyangkut nasabah penyimpan dan simpanannya, terutama yang dianggap mencurigakan. Karena hal ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 ini, khususnya dalam Bab IV tentang Pelaporan, yang secara khusus disebutkan dalam Pasal 13, yaitu "Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

sebagaimana dimaksud dalam Bab V, untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. transaksi keuangan mencurigakan;
- b. transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja”.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dalam hal tersebut di atas, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa : “Dalam melaksanakan fungsinya PPATK mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan Undang-Undang ini;
- b. memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;
- c. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan;
- d. memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- e. mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan

dalam Undang-Undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;

- f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- g. melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;
- h. membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan”.

Untuk melakukan pengawasan dan ketentuan mengenai perbankan serta lalu lintas keuangan dan demi mencegah berkembangnya kejahatan pencucian uang dan atau untuk memberantas tindak pidana pencucian uang dan karena belum dibentuknya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan di Indonesia oleh Pemerintah, maka baru-baru ini Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia yaitu (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah atau “Know Your Customer”. Hal ini diartikan sebagai prinsip yang diterapkan oleh bank atau penyedia jasa keuangan untuk mengenal nasabahnya, termasuk melaporkan setiap transaksi yang

mencurigakan. Yang dimaksud dengan transaksi yang mencurigakan adalah transaksi yang tidak sesuai dengan karakteristik dan profil nasabah. Dengan demikian faktor utama untuk menentukan transaksi yang mencurigakan adalah dengan mengetahui kelaziman transaksi yang dilakukan nasabah. Dalam prinsip mengenal nasabah, bank juga diwajibkan untuk menetapkan empat kebijakan baru, yaitu yang pertama adalah kebijakan penerimaan nasabah, kedua yaitu kebijakan dan prosedur mengidentifikasi nasabah, ketiga adalah pemantauan rekening dan transaksi nasabah, serta yang terakhir yaitu manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip tersebut.⁶²

Di samping itu, pihak bank juga diwajibkan untuk meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah, bahkan bila diperlukan, pihak bank bisa melakukan wawancara untuk meneliti keabsahan dokumen tersebut. Dan yang terpenting, bank berkewajiban untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada Bank Indonesia (BI). Bank Indonesia kemudian mengelompokkan transaksi yang mencurigakan ini menjadi enam kategori yang tergolong mencurigakan, yaitu :

1. transaksi secara tunai jika dilakukan melalui penyetoran dalam jumlah besar yang tidak lazim, penyetoran tanpa penjelasan yang memadai, penyetoran dengan beberapa

⁶² Media Indonesia, Jakarta, 11 Juli 2001.

- slip, penyetoran dalam jumlah besar melalui rekening titipan setelah jam kerja kas;
2. transaksi dengan menggunakan rekening bank. Termasuk dalam kategori ini antara lain, pemeliharaan beberapa rekening atas nama pihak lain;
 3. transaksi yang berkaitan dengan investasi. Transaksi semacam ini menurut Bank Indonesia biasanya terkait dengan pembelian surat berharga untuk disimpan di bank sebagai kustodian;
 4. transaksi melalui aktivitas bank luar negeri yang di antaranya melalui penghimpunan dana dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan karakteristik perputaran usaha, serta transfer elektronik tanpa penjelasan memadai;
 5. transaksi yang melibatkan karyawan bank atau agen di mana terjadi peningkatan kekayaan karyawan bank. Selain itu hubungan transaksi melalui agen tidak dilengkapi dengan informasi yang memadai;
 6. transaksi pinjam meminjam di mana terjadi pelunasan pinjaman secara tidak terduga, serta permintaan pembiayaan, dimana dana nasabah tidak jelas asal usulnya.⁶³

Bagi Bank yang tidak melaksanakan kewajiban seperti yang tertuang dalam Peraturan BI (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

⁶³ Elvyn G. Masassya, *loc.cit.*

ini, maka akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif ini dijatuhkan bila selambat-lambatnya setelah tujuh hari kerja, pihak bank yang mengetahui transaksi yang mencurigakan, tetapi tidak melaporkannya kepada Bank Indonesia. Besarnya sanksi administratif ini, yaitu dengan membayar denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dan setinggi-tingginya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bertalian dengan apa yang telah disebutkan di atas, maka dalam hal ini, Pemerintah harus segera membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana yang telah diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, khususnya Pasal 18 yang menyebutkan bahwa :

- (1) Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dengan Undang-Undang ini dibentuk PPATK.
- (2) PPATK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
- (3) PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.

Bagi pembentukan PPATK ini, yang terpenting adalah tentu saja dalam menentukan dan memilih para anggota PPATK ini, harus benar-benar dipilih orang yang jujur, obyektif dan harus bekerja secara transparan.

Banyak kritikan positif yang masuk bertalian dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya mengenai tugas dan fungsi dari PPATK ini, diantaranya adalah memberikan wewenang yang lebih kuat dan jelas bagi PPATK untuk melaksanakan penyelidikan serta untuk membekukan atau menyita harta kekayaan dan aktifa lainnya yang diperoleh dengan menggunakan hasil tindak pidana. Dengan demikian keberadaan lembaga ini dapat lebih berjalan dengan efektif.

Menurut pakar hukum Harkristuti Harkrisnowo, praktek pencucian uang memang sudah ada dan terjadi di Indonesia. Dari hasil penelitian dari beberapa teman dan mahasiswa beliau, ditunjukkan bahwa praktek pencucian uang itu telah terjadi di Indonesia. Menurutnya, mudah melihat dan merasakan indikasi adanya praktek pencucian uang, tetapi untuk mendeteksi dan mencari bukti-bukti asal usul uang yang dicuci sangatlah sulit. Harkristuti juga menyebutkan, dengan arus globalisasi sekarang ini, tampaknya kita harus sudah memulai kegiatan penelitian serius mengenai keberadaan dan prevalensi pencucian uang di Indonesia sehingga dapat diambil langkah-langkah konkret untuk mengatasinya, sebelum aktivitas ini makin meluas seperti di negara lain.⁶⁴ Senada dengan Harkristuti, pakar hukum yang lain yaitu Muladi juga menengarai bahwa praktek "money laundering" memang sedang banyak terjadi di

⁶⁴ Harkristuti Harkrisnowo, wawancara di Media Indonesia, Jakarta, 16 Juli 2001.

Indonesia, terutama uang-uang haram dari hasil kejahatan narkotik yang diintegrasikan ke dalam proyek-proyek legal.⁶⁵

Kendati sulit untuk dibuktikan, namun diindikasikan pada dasawarsa terakhir ini memang banyak “uang haram” yang sudah beredar di Indonesia. Secara yuridis formal, praktek pencucian uang di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang. Namun kenyataannya belum ada pelaku tindak pidana pencucian uang yang dapat diseret ke pengadilan maupun diadakan penyelidikan mengenai hal tersebut. Ini dikarenakan, hingga saat ini Pemerintah dengan DPR belum juga membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sesuai apa yang tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bertalian dengan hal tersebut di atas, maka ada upaya atau celah hukum dalam KUHP yang mungkin sementara waktu dapat dipergunakan sambil menunggu terbentuknya PPATK, seperti pasal-pasal yang bertalian dengan kejahatan-kejahatan yang dalam kategori hasil tindak pidana pencucian uang yaitu yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Pasal-pasal tersebut misalnya, antara lain :

Pasal 480 KUHP.

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, karena penadahan :

⁶⁵ Majalah SWA, *loc.cit.*

1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena ingin mendapatkan keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.
2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa diperoleh dari kejahatan.

Pasal 481 KUHP.

- (1) Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.
- (2) Yang bersalah dapat dijatuhi pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 nomor 1 – 4 dan haknya untuk melakukan pekerjaan dalam mana kejahatan itu dilakukan.

Demikian pula dengan Pasal 39 ayat 1 KUHP tentang penyitaan barang bukti dapat pula digunakan sebagai dasar untuk menangani kasus-kasus yang terjadi sepanjang sudah jelas tindak pidana apa yang melatarbelakanginya. Juga beberapa undang-undang lain yang berkenaan dengan tindak pidana “money laundering” seperti misalnya UU No. 31 Tahun 1999 dan perubahannya yaitu UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta

amandemennya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.⁶⁶

Perlu diketahui, bahwa jauh sebelum Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ini disahkan, juga telah dicoba upaya untuk mengantisipasi masalah “money laundering” ini yaitu dengan mencantumkannya pada Rancangan Undang-Undang KUHP (Baru) yang dituangkan dalam Pasal 610 dan Pasal 611. Kejahatan “Money Laundering” ini memang sangat erat hubungannya dengan tindak pidana atau kejahatan, oleh karena itu dengan menanggulangi “money laundering” juga berarti penanggulangan terhadap tindak kejahatan yang melatarbelakanginya.

Pada hakekatnya, seluruh hasil dari tindak pidana yang dilegalkan harus termasuk dalam tindak pidana “money laundering”. Tidak seperti dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 di Pasal 2 yang menyatakan bahwa : “Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau nilai yang setara, yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan :

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. penyelundupan barang;
- d. penyelundupan tenaga kerja;
- e. penyelundupan imigran;
- f. perbankan;
- g. narkotika;

⁶⁶ Koesparmono Irsan, *loc. cit.*

- h. psikotropika;
- i. perdagangan budak, wanita, dan anak;
- j. perdagangan senjata gelap;
- k. penculikan;
- l. terorisme;
- m. pencurian;
- n. penggelapan;
- o. penipuan,

yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara republik Indonesia dan kejahatan tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia". Oleh sebab itu, Pasal 2 ini banyak mendapat sorotan tajam. Diantaranya yaitu bentuk-bentuk kejahatan dalam Pasal 2 ini seharusnya tidak dibatasi jenis tindak pidananya, seperti dilakukan oleh negara-negara lain. Selain itu yang juga dipertanyakan adalah mengapa hasil dari tindak pidana perjudian maupun pelacuran tidak dimasukkan dalam daftar ini. Apakah itu berarti uang hasil perjudian dan pelacuran yang telah disamarkan tidak dapat ditindak melalui Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini ?

Namun memang, apabila modus operandi "money laundering" yang dilakukan oleh para pelaku "money laundering" sudah sedemikian canggih serta bervariasi, maka pasal-pasal dan undang-undang tersebut tentu saja tidak akan mencukupi, sehingga perlu adanya ketentuan-ketentuan khusus, seperti Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk bisa dijadikan dasar sebagai proses penyidikan lebih lanjut.

Yang perlu diingat dan diperhatikan bagi negara bertalian dengan tindak pidana pencucian uang adalah akibat yang akan ditimbulkannya. Karena kerugian terbesar dari kegiatan pencucian uang ini bagi negara adalah menurunnya kredibilitas perbankan nasional baik di dalam maupun di dunia internasional sehingga dapat melumpuhkan struktur pemerintahan suatu negara serta menurunnya tingkat perekonomian. Selain itu, jika kejahatan ini dibiarkan tanpa penyidikan, akan mengakibatkan negara yang bersangkutan dikucilkan dari pergaulan internasional.

Iklim Indonesia memang sangat cocok untuk menyuburkan "money laundering". Negara ini memiliki banyak faktor yang sangat menunjang untuk praktek "money laundering" sebagaimana telah diuraikan di atas. Namun beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan ini sulit diberantas bahkan makin dan semakin berkembang di Indonesia adalah :⁶⁷

Pertama, peraturan rahasia bank. Biasanya negara-negara yang peraturan rahasia banknya sangat ketat seperti Indonesia dan biasanya negara-negara di kawasan pantai, pasti menjadi sasaran yang menggiurkan bagi pencucian uang. Perbankan di Indonesia dikenal sangat ketat melindungi nasabahnya dengan perisai rahasia bank. Suatu rekening yang dicurigai sebagai wahana penyimpanan uang haram sekali pun, hanya dapat diketahui dan diperiksa

⁶⁷ Majalah SWA, *op.cit.*

dengan izin tertulis dari Bank Indonesia. Dan repotnya, Bank Indonesia baru akan memberikan izin jika bukti-bukti awal dari kecurigaan itu sudah ada, sedangkan untuk menyodorkan bukti-bukti tersebut, para penyidik perlu melihat data rekening tadi. Semoga hal ini dapat ditanggulangi dengan peraturan Bank Indonesia yang terbaru yaitu (PBI) No. 3/10/PBI/2001.

Kedua, ketentuan yang mengatur bahwa untuk menyimpan depositonya di bank, nasabah tidak perlu untuk menyebutkan asal usul uangnya. Bahkan untuk berinvestasi di luar perbankan dan lembaga-lembaga keuangan sekalipun, nasabah sama sekali tidak perlu menyebutkan dari mana asal dana yang diperolehnya. Kedua ketentuan ini bisa sangat menyuburkan praktek "money laundering".

Ketiga, rezim devisa bebas yang dianut Indonesia. Dengan ketentuan ini, setiap orang bebas membawa uang berapapun besarnya, baik apakah itu uang halal maupun uang haram dapat masuk maupun ke luar Indonesia tanpa perlu melapor sama sekali. Peraturan Pemerintah No. 16/1970 dan PP No. 1/1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa memperbolehkan siapapun memperoleh dan menggunakan devisa hasil ekspor maupun dari sumber lainnya, tanpa perlu proses pencatatan dan pelaporan. Undang-Undang tentang keimigrasian juga tidak membatasi apalagi melarang orang asing membawa valuta

asing ke wilayah Indonesia. Begitu pula, tidak ada kewajiban mencatatkan atau melaporkan devisanya ini.

Keempat, teknologi perbankan di Indonesia sudah lumayan canggih. Penerapan "electronics banking" juga sudah cukup marak melalui telepon (phone banking) maupun melalui Internet, sehingga transfer dana secara elektronik dapat dilakukan dengan mudah, murah dan cepat. Dengan demikian proses "money laundering" juga semakin mudah. Berbagai instrumen baru dan kemudahan melakukan transaksi lintas negara dengan biaya yang sangat murah serta proses yang cepat memudahkan uang kotor bernilai jutaan dollar dengan bilangan sepersekian detik dapat berpindah dari satu negara ke negara lainnya, cukup dengan memencet beberapa tombol komputer saja.

Kelima, lemahnya perangkat hukum positif dan aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya "money laundering". Sejauh ini, Indonesia baru memiliki Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tetapi belum direalisasikan dan diaplikasikan, juga peraturan-peraturan lain penunjangnya.

Tentu tidaklah mudah seperti membalik telapak tangan terhadap keadaan yang sudah sedemikian buruk menjadi baik. Jika pada suatu saat nanti sistem perbankan dan lembaga keuangan di Indonesia dapat menerima dan menerapkan sistem yang dianut oleh sebagian besar negara-negara maju saat ini mengenai "money laundering", maka bagi

para penegak hukum akan dihadapkan kepada suatu tantangan untuk mampu menangani kasus-kasus “money laundering” sebagai suatu kejahatan tersendiri.

Harapan lebih lanjut tentu saja terletak pada pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Megawati Sukarnoputri berdasarkan hasil Sidang Istimewa MPR yang baru berlalu. Masyarakat akan melihat dan minta bukti, apakah pemerintah yang baru terbentuk ini benar-benar ingin memberlakukan dan menerapkan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang secara efektif atau hanya sekedar retorika dan penghias bibir saja seperti dahulu. Karena hal ini akan mustahil terlaksana jika “political will” dari pemerintah sendiri tidak ada. Yang jelas, masyarakat telah lelah menunggu.

B. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Salah Satu Instrumen Penanggulangan Korupsi.

Berdasarkan penelitian Transparency International (TI), selama 5 tahun berturut-turut, yaitu tahun 1995 sampai dengan tahun 2000, Indonesia selalu menduduki posisi 10 besar negara paling korup di dunia. Dan berdasarkan penelitian dari “Political and Economic Risk Consultancy” (PERC) tahun 1997, Indonesia menempati posisi sebagai negara yang terkorup di Asia. Korupsi di Indonesia sudah

terjadi di semua aras dan bidang, termasuk juga peradilan. Bahkan khusus untuk korupsi di pengadilan saja, mantan Ketua Muda Mahkamah Agung (MA) Asikin Kusumah Atmadja menyatakan bahwa jumlah hakim korup di Indonesia mencapai sekitar 50 %. Dalam laporan mengenai "Bureaucratic and Judicial Bribery" oleh Daniel Kaufmann tahun 1998, dinyatakan bahwa penyuapan di peradilan di Indonesia adalah yang paling tinggi di antara negara-negara seperti Ukraina, Venezuela, Rusia, Kolombia, Mesir, Yordania, Turki dan lainnya.⁶⁸

Yang pasti tidak sedikit pejabat, birokrat maupun aparat penegak hukum yang melakukan korupsi. Data yang dikeluarkan Kejaksaan Agung dalam kasus-kasus korupsi, hampir sebagian besar merupakan nama-nama yang tidak asing lagi. Dapat disebut antara lain misalnya Tanri Abeng dalam kasus korupsi proses penagihan utang piutang Bank Bali kepada BDNI sebanyak Rp 904,6 miliar; Faisal Abda'oe, Siti Hardianti Rukmana dan Rosano Barack dalam kasus korupsi dalam proyek pemasangan pipa BBM di Jawa sebanyak US\$ 20,401,757 ; Faisal Abda'oe dan Ginanjar Kartasasmita dalam kasus korupsi pembuatan amandemen technical contract antara Pertamina dengan PT Ustraido Petro Gas (UPG) sebanyak US\$ 23,351,808 ; Johanes Soekotjo dan Robby Tjahyadi dalam kasus korupsi pada kredit P.T. Bank

⁶⁸ Rifqi Sjarief Assegaf, Hanya Hakim yang Bersih dan Kompeten yang Layak Adili Koruptor, Makalah pada workshop mengenai Pengadilan Korupsi, Jakarta, Juni 2001.

Bumi Daya dan Bapindo dalam "Take Over" dan restrukturisasi sebanyak Rp 300 miliar; I.B. Soedjana dalam kasus pembuatan amandemen technical contract antara Pertamina dan P.T. UPG sebanyak US \$ 23,351,808; Probosutedjo dalam kasus penyalahgunaan dana HTI di Kalimantan Selatan; Samadikun Hartono dalam kasus penyelewengan dana BLBI oleh bank penerima Bank Modern sebanyak Rp 766 miliar.⁶⁹

Angka-angka di atas bisa akurat atau bisa juga tidak. Terlepas dari hal tersebut, dapat dibayangkan berapa besar kerugian negara akibat dampak kasus-kasus korupsi tersebut dan berapa besar pengaruhnya bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini jugalah yang menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap para birokrat, pejabat dan aparat hukum menjadi sangat rendah.

Oleh karena itu ada ungkapan yang belakangan ini seringkali dipergunakan masyarakat untuk menggambarkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap para aparat penegak hukum, yaitu "bagaimana mungkin membersihkan lantai yang kotor dengan sapu yang kotor". Maksudnya bagaimana mungkin memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) bila para birokrat, pejabat dan aparat penegak hukumnya yang seharusnya memberantas KKN ternyata terlibat dalam KKN pula.

⁶⁹ Suara Pembaharuan, Jakarta, 24 Juni 2001.

Dengan demikian mudah untuk difahami mengapa tindak pidana korupsi mempunyai kedudukan khusus dalam sistem hukum Indonesia, dan karenanya Kejaksaan Agung diminta secara khusus untuk mendahulukan kasus-kasus korupsi dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya. Maka jangan heran kalau rakyat marah apabila mendengar bahwa kasus-kasus korupsi yang dituntut oleh para jaksa itu ternyata tenggelam ditelan proses.

Korupsi memang menjadi perbincangan yang hangat dimana-mana. Sehingga Kongres PBB ke 8 di Havana, Cuba, juga memberi penekanan terhadap masalah korupsi ini. Seperti dikutip Prof. Barda Nawawi, bahwa Kongres PBB ke 8 menyatakan, korupsi sangat perlu diperhatikan mengingat "corrupt activities of public official", yaitu :⁷⁰

- a). dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah (can destroy the potential effectiveness of all types of governmental programmes);
- b). dapat mengganggu / menghambat pembangunan (hinder development);
- c). menimbulkan korban bagi individual maupun kelompok (victimize individuals and groups).

Kasus korupsi dan kolusi yang terjadi di Indonesia memang luar biasa banyaknya, termasuk di dalamnya yaitu kasus

⁷⁰ Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya, Bandung, 1996, hal. 18.

dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pastilah, sebagian besar uang haram itu telah berubah wujud menjadi investasi berupa mobil mewah, benda seni, dan “property” di luar negeri. Sebagian besar kepemilikan benda itu, konon diatas namakan orang lain. Kejaksaan Agung dan kepolisian pasti akan kesulitan melacak larinya uang hasil korupsi itu. Jadi jangan heran, seorang presiden yang korup akan bisa tampil sebagai orang yang tidak kaya, “cuma” punya beberapa miliar rupiah, tapi dikelilingi anak-cucu dan teman-teman yang kaya raya, yang seakan-akan sukses dalam berusaha.

Sampai saat ini kasus-kasus yang disebutkan di atas belum juga dapat diselesaikan. Artinya, para birokrat, pejabat dan aparat penegak hukum yang melakukan praktek tidak terpuji itu yaitu korupsi dan juga kolusi belum dapat dijerat melalui hukum. Mereka masih bebas berkeliaran dan bisa berlenggang kangkung ke mana saja.

Memang ada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah korupsi dan kolusi, seperti pelaporan kekayaan pejabat bisa merupakan salah satu cara yang preventif, karena pertambahan kekayaan pejabat akan mudah diketahui asal-usulnya. Asas pembuktian terbalik untuk kasus korupsi juga semakin mempermudah pengusutan tindak korupsi. Tetapi, bagaimana cara melacak semua uang haram hasil kegiatan illegal itu, sehingga negara bisa mengambil atau menariknya kembali? Di sinilah perangkat hukum mengenai pencucian uang atau “money

laundering”, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 menjadi sangat penting. Tak hanya uang haram hasil korupsi saja yang menjadi target, tapi hasil penjualan narkotik, penyelundupan, dan perjudian pun bisa menjadi sasaran.

Sebenarnya sudah sejak lama, ada pemikiran agar Indonesia memiliki Undang-Undang tentang Anti Pencucian Uang. Hanya saja Pemerintah Orde Baru yang berkuasa pada saat itu tampaknya tidak menghendakinya. Mungkin mereka mengkhawatirkan dengan adanya Undang-Undang ini bisa membendung aliran masuk dana yang sangat diperlukan untuk pembangunan di Indonesia di satu sisi, dan di sisi yang lain, adanya Undang-Undang “money laundering” ini akan menyulitkan para pejabat Indonesia sendiri yang selama ini ternyata juga bermain dalam praktek “money laundering”. Jadi tidak heran, jika pemikiran agar Indonesia memiliki Undang-Undang “money laundering” selalu ditentang keras oleh sejumlah pejabat pada waktu itu.

Saat ini Pemerintah telah mendapat tekanan baik dari masyarakat, dari LSM-LSM, terutama dari FATF maupun organisasi lembaga internasional lainnya untuk segera menindak lanjuti Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 15 Tahun 2002, karena meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang tentang Tindak Pencucian Uang ini, tetapi Indonesia belum terlepas dari status negara yang tidak kooperatif dalam menangani masalah ini, karena Indonesia baru memiliki Undang-Undang nya saja tetapi

implementasinya masih perlu untuk dibuktikan. Hal ini terbukti dengan sejumlah koruptor besar di Indonesia yang juga belum dapat ditangkap dan hasil korupsinya yang begitu banyak belum dapat disita, karena keterbatasan dan kemandulannya Undang-Undang Korupsi.

Sejak Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini diberlakukan, Bank Sentral Indonesia dalam laporannya menyatakan bahwa mereka telah menerima 40 laporan transfer rekening yang mencurigakan dari dua bank asing dan lima bank domestik. Dan transaksi yang dilaporkan ini, saat ini sedang ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan dan penyelidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Undang-Undang "Money Laundering" sangat penting untuk diaplikasikan, khususnya dengan membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang dapat bekerja sama dengan Lembaga Keuangan, misalnya Bank Indonesia, karena kasus korupsi dan hasil korupsi yang dilakukan saat ini acapkali sudah dicuci dan diputar-balikkan dengan sedemikian canggih dalam Lembaga Keuangan sehingga hasil tindak pidana korupsi tidak dapat dikembalikan karena asal muasal uang tersebut tidak lagi dapat ditelusuri.

Sebagai contoh sederhana, seperti A Korupsi 2 miliar rupiah lalu ia berusaha mengelabui penegak hukum dengan cara "money laundering" paling sederhana. Ia membeli rumah

di Jakarta sebesar 2 miliar, dengan perjanjian rahasia dengan pemilik, bahwa yang dicatat di Akte Notaris hanya 1 miliar rupiah, 1 miliar yang lain dibayar langsung sebelum menghadap ke Notaris. Lalu ia jual kembali seharga 2 miliar, kali ini di hadapan notaris, benar-benar tertulis 2 miliar. Dengan demikian ia mendapat untung fiktif 1 miliar, demikian seterusnya. Cara yang demikian ini juga termasuk merupakan tindak pidana pencucian uang atau “money laundering” dan juga termasuk dalam tindak pidana korupsi, yang acapkali tidak dapat dijerat oleh Undang-Undang Korupsi. Oleh karena itu Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat digunakan pula sebagai salah satu sarana menanggulangi korupsi di Indonesia.⁷¹ Paling tidak, adanya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ini dapat mempersempit ruang gerak beredarnya uang haram di Indonesia, khususnya uang haram yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Namun perlu diingat juga, agar undang-undang ini dapat dipakai dan berlaku dengan efektif, maka pengimplementasiannya harus benar-benar diperhatikan oleh Pemerintah dan badan legislatif agar nantinya tidak terulang kembali kejadian seperti Undang-Undang Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang ternyata harus diamandemenkan kembali agar dapat berfungsi dengan efektif.

⁷¹ Andi Hamzah, *loc.cit.*

Selain itu penting pula memperhatikan rekomendasi dari FATF yang menganjurkan agar setiap negara untuk memperluas cakupan tindak pidana pencucian uang menjadi tindak pidana pencucian uang berdasarkan tindak pidana berat dan setiap negara akan menentukan tindak pidana berat yang mana yang akan ditetapkan sebagai tindak pidana penyebab pencucian uang. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang tentang Pencucian Uang Nomor 15 Tahun 2002 Pasal 2. Namun bila hal ini dipandang kurang tepat dengan era globalisasi, maka dapat dilakukan dengan cara mendefinisikan tindak pidana pencucian uang yaitu mencakup semua tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana yang memenuhi uji generik dasar, misalnya tindak pidana dengan hukuman di atas tingkat tertentu (misalnya hukuman penjara lebih dari 3 tahun), yang tentunya akan diatur kemudian dalam peraturan khusus penunjang Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Apabila pendekatan ini diterapkan, maka Undang-Undang tentang Pencucian Uang ini diharapkan akan dapat menyesuaikan diri dengan tindak pidana baru yang mungkin akan timbul sesuai dengan kemajuan zaman.

Beberapa komentar dari para pakar hukum maupun analisis singkat di atas telah menunjukkan bahwa Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini memang dapat digunakan sebagai salah satu perangkat hukum khususnya bagi tindak pidana korupsi dengan cara

menelusuri transaksi-transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan, yang kemudian diselidiki dan ditindak dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Selanjutnya setelah diketemukan bukti-bukti keterlibatan orang yang melakukan korupsi, kemudian pelakunya dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan demikian uang hasil korupsi kembali kepada Negara dan pelakunya juga dapat diadili. Disamping itu, ada keuntungan lain yang juga dapat diperoleh, yaitu terhadap kasus-kasus korupsi atau kasus penyelundupan narkoba. Penyidik akan mampu menjerat mereka dengan dua tuduhan sekaligus. Pertama, "primary crime"-nya yaitu korupsi atau narkoba, dan yang kedua, tindak pidana pencucian uang. Tetapi hal ini dapat dilakukan dengan syarat, yaitu PPATK ataupun Bank Indonesia dapat membantu menyerahkan laporan dokumen-dokumen yang terkait dengan kasus tersebut ke pihak penyidik. Dengan demikian, orangnya dapat dihukum berat, sementara itu, uang hasil kejahatannya dapat dikembalikan masuk dalam kas negara.

Namun perlu diperhatikan pula peran Pemerintah dalam mengawasi kegiatan "money laundering", karena sangat berguna untuk menghindarkan Indonesia sebagai surga untuk cuci uang. Dan, lebih bagus lagi apabila mekanisme pengawasan ini disertai juga dengan laporan kekayaan pejabat negara yang ada di bank-bank di Indonesia atau yang ada di luar negeri kalau mau jujur. Mungkin tingkatannya

dari eselon satu hingga eselon tiga, termasuk anggota DPR dan MPR, serta di tingkat daerah dari Gubernur sampai dengan Bupati, termasuk anggota DPRD. Rencana ini juga akan sangat efektif, apalagi jika dikombinasikan dengan Undang-Undang Antikorupsi yang telah disahkan DPR beberapa waktu lalu.

Jangan dilupakan peranan pers dalam hal ini, karena melalui media massa pula masyarakat dapat mengawasi dan mengontrol pemerintah. Oleh sebab itu, perlu juga dipikirkan rencana akan adanya Undang-Undang tentang Kebebasan Informasi, agar koran, majalah, televisi dan media pers lainnya dapat memberikan berita-berita dengan aman dan terpercaya sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara jelas dan transparan.

Membuat undang-undang maupun mengawasi jalannya undang-undang agar digunakan secara benar dan efektif memang bukan pekerjaan yang mudah. Yang penting harus mulai bersih dari atas. Ibarat air mengalir, bila dari sumbernya sudah tidak bersih maka air yang mengalir ke bawah juga tidak akan bersih. Jadi sumber daya manusia di bidang penegakan hukum harus bersih, walaupun semua tidak bisa dilakukan secara simsalabim. Banyak unsur yang berperan di dalamnya, baik kultur, nilai-nilai moral dan etika yang harus dihidupkan kembali dan diimplementasikan secara efektif dan transparan. Mungkin kita harus mengambil segi positif dari kultur di Jepang seperti "harakiri" dan minta

berhenti jadi pejabat kalau bawahan yang melakukan kesalahan (guilt culture). Semoga hal ini dapat dipertimbangkan secara dewasa di Indonesia.

C. Money Laundering Sebagai Lex Specialis Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Perkembangan kejahatan dewasa ini tidak lagi hanya sebatas teritorial suatu negara melainkan sudah melampaui batas teritorial, bahkan sudah menimbulkan dampak terhadap dua negara atau lebih, serta sudah memiliki ruang lingkup dan jaringan internasional. Upaya untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan itu tidak dapat dilakukan hanya dengan perangkat peraturan hukum nasional, tetapi seharusnya juga dilaksanakan melalui kerjasama dengan negara lain, baik bersifat bilateral maupun multilateral. Pelaksanaan kerjasama tersebut sudah tentu akan memberikan dampak terhadap perkembangan hukum nasional suatu negara, karena setiap negara memiliki kewajiban moral dan kewajiban hukum.⁷²

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tampak jelas bahwa perkembangan kejahatan internasional dapat mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan substansial

⁷² Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (Perspektif, Eksistensialisme dan Abolisionisme), Binacipta, Bandung, 1996, hal. 88.

terhadap hukum nasional, baik bertalian dengan hukum pidana materiel maupun hukum acara pidananya (hukum pidana formal).⁷³ Ini berarti ada kemungkinan hal itu akan membawa konsekuensi yang menyangkut jenis pidana maupun yang bertalian dengan sistem pemidanaan. Selanjutnya, hal itu akan membawa konsekuensi pula pada (sistem) hukum acara pidana.

Oleh sebab itu, dalam perkembangan dunia yang makin modern di mana sistem informasi dan dampak teknologi akan sangat berperan dengan segala problematik dan ramifikasinya, maka beberapa disiplin ilmu akan juga mengalami diversifikasi. Demikian pula dalam dunia hukum. Bila ada undang-undang yang sebelumnya diperkirakan dapat cukup mengatur perilaku kehidupan manusia ternyata juga harus mengalami diversifikasi, seperti yang akan dibahas di sini, misalnya Undang-Undang Korupsi yang ada sekarang ini dianggap belum cukup memadai untuk mencari, menindak dan adanya usaha untuk mengembalikan uang hasil korupsi. Karena itu, kemudian atas berbagai desakan luar negeri lalu dirancanglah Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang atau "money laundering".

Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dibuat dan yang telah disahkan sekarang inipun menimbulkan banyak diskusi dan pendapat yang berbeda-beda di kalangan para pakar hukum pidana. Loebby Loqman,

⁷³ *Ibid.*

misalnya, dalam makalah yang disajikan pada lokakarya tentang "Money Laundering" menyatakan bahwa bila dilihat bentuk Undang-Undang-nya, terlihat bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai hukum pidana khusus. Undang-Undang tersebut memang bertalian dengan tindak pidana Pencucian Uang tetapi lebih dititikberatkan pada hukum administrasi, di mana di dalamnya terdapat selain ketentuan pidana, terdapat pula pengaturan yang menyangkut hukum acaranya. Oleh karena itu beliau menulis, seyogianya dilakukan pengaturan secara tegas, bahwa tindak pidana pencucian uang adalah termasuk suatu tindak pidana, sehingga unsurnya dituliskan secara terperinci, yang diikuti dengan ancaman pidananya.⁷⁴

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam tulisan mengenai Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dengan Hukum Pidana memberi ulasan yang menarik terhadap masalah ancaman pidana minimal khusus yang dapat dibenarkan, namun harus disertai dengan aturan penerapannya secara khusus, oleh karena :

1. suatu ancaman pidana tidak dapat begitu saja diterapkan atau dioperasionalkan hanya dengan dicantumkan dalam perumusan delik;
2. untuk dapat diterapkan, harus ada aturan pembedaan (straftoematingsregel)-nya terlebih dahulu;

⁷⁴ Loebby Loqman, *loc.cit.*

3. aturan penerapan pidana yang ada selama ini diatur dalam “aturan umum” KUHP (sebagai sistem induk);
4. aturan (pidanaan) umum dalam KUHP semuanya berorientasi pada sistem maksimal, tidak pada sistem minimal;
5. oleh karena itu, apabila UU di luar KUHP akan menyimpang dari sistem umum KUHP, maka UU di luar KUHP seharusnya membuat aturan (pidanaan) khusus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 103 KUHP.⁷⁵

Jika demikian keadaannya, maka sistem pidana dan pidanaannya harus dirancang secara terpisah dan dengan sendirinya tidak akan mengikuti pola pemikiran sebagaimana dianut dalam KUHP. Dengan lain perkataan akan timbul teori-teori baru yang menyangkut pidana dan pidanaan, sebagaimana yang antara lain, dikemukakan oleh Sahetapy (1994), yang menyangkut interpretasi fungsional. Ini berarti, kepentingan yang manakah yang ingin dilindungi oleh pembentuk undang-undang. Konsekuensi lebih lanjut adalah menyangkut pula hukum acaranya yaitu pembuktian yang sah.

Adanya pro dan kontra terhadap bentuk pendekatan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini memang tak dapat dihindarkan. Dan harus diakui secara jujur oleh Pemerintah dan lembaga

⁷⁵ Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya, Bandung, 2001, hal.219.

legislatif bahwa Undang-Undang ini mempunyai banyak sisi kelemahan dan lubang-lubang yang dapat digunakan para pelaku "money laundering" untuk dapat lolos dari jerat hukum. Namun yang juga harus diingat oleh masyarakat bahwa suatu kebijakan itu dibuat, juga didasarkan atas politik hukum. Menurut Prof. Sudarto, sebagaimana dikutip oleh Prof Barda Nawawi dalam bukunya "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana", yang dimaksud dengan "Politik Hukum" adalah :

- a). Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b). Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Hal ini berarti, melaksanakan politik hukum pidana adalah suatu usaha dalam rangka mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁷⁶

Oleh sebab itu, dalam rangka mensosialisasikan dan melaksanakan suatu perundang-undangan, perlu diketahui suatu bentuk pendekatan sistem, yaitu pendekatan yang

⁷⁶ Arief, Barda Nawawi, *op.cit.*, hal. 28.

mempergunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam proses penegakan hukum, unsur-unsur tersebut meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Bentuk pendekatan dalam sistem peradilan pidana atau yang biasa disebut pula "criminal justice system", dikenal memiliki tiga bentuk pendekatan, yaitu :⁷⁷

1. *Pendekatan normatif*, yang memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.
2. *Pendekatan administratif*, yang memandang keempat aparat penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku.
3. *Pendekatan sosial*, yang memandang keempat aparat penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparat penegak

⁷⁷ Romli Atmasasmita, *op. cit.*, hal. 17.

hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Jadi sistem peradilan dapat dilihat dari ketiga bentuk pendekatan di atas, yang meliputi pendekatan normatif, administratif dan sosial. Ketiga bentuk ini walaupun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Bahkan lebih jauh, ketiga bentuk pendekatan tersebut mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.⁷⁸

Terhadap perkembangan kejahatan, menurut Romli Atmasasmita, telah dihasilkan tiga dimensi, yaitu :

- a. Kejahatan yang bermuara pada dimensi kepapaan, yang menghasilkan kejahatan-kejahatan konvensional, seperti pencurian, pencopetan, dan lain-lain.
- b. Kejahatan yang bermuara pada dimensi keserakahan, yang menghasilkan bentuk kejahatan yang disebut "corporate crime" atau "white collar crime". Pencucian uang atau "money laundering" termasuk dalam dimensi ini.
- c. Kejahatan yang bermuara pada dimensi kekuasaan, yang menghasilkan bentuk kejahatan yang dikenal dengan sebutan korupsi atau perbuatan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam menghadapi ketiga jenis dimensi kejahatan tersebut di atas, sistem peradilan pidana sangat jarang menghadapi

⁷⁸ *Ibid.*

para pelaku kejahatan dari dimensi keserakahan dan kekuasaan jika dibandingkan dengan dimensi kepapaan. Beberapa masalah yang sering tidak terselesaikan oleh sistem peradilan dalam menghadapi kejahatan berdimensi keserakahan dan kekuasaan adalah karena tidak tersedianya tenaga ahli yang berkaitan dengan masalah hukum, prosedur penyelesaiannya sering menghabiskan biaya yang sangat besar, juga masalah ketentuan pidana dalam undang-undang yang tersedia, yang dirasakan tidak mampu untuk menjerat para pelaku kejahatan tersebut.⁷⁹

Realita dari unsur yang terakhir ini, yaitu masalah ketentuan pidana yang acapkali muncul dalam berbagai macam kasus dewasa ini, misalnya Undang-Undang Korupsi yang ada sekarang ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tidak dapat dipakai untuk menangkap atau mengadili para koruptor di waktu yang lampau. Oleh sebab itu, bagi pembentuk undang-undang yang harus diingat bahwa dalam menyusun ketentuan pidana, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. perbuatan-perbuatan apa yang perlu dipidana. Di sini menyangkut ukuran nilai tentang apa yang dipandang jahat dan perlu diberi sanksi pidana.
- b. sanksi jenis apa yang perlu dikenakan.⁸⁰

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Andi Hamzah, *loc.cit.*

Bertolak dari uraian di atas, diharapkan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 15 Tahun 2002, yang telah disahkan ini dapat sesuai dan sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan berlaku secara efektif, walaupun dalam Undang-Undang ini telah diatur secara tersendiri mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang berbeda seperti sebagaimana yang disyaratkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Yang perlu untuk diingat bahwa untuk membentuk kebijakan legislatif, perlu ada pertimbangan-pertimbangan kembali, apakah Undang-Undang serta peraturan yang ada maupun yang akan dibuat, tidak menjadi faktor kriminogen baru, karena memiliki peluang atau celah yang dapat menimbulkan penyelewengan, pelanggaran dan kejahatan yang justru timbul dari peraturan tersebut. Karena tidak sedikit produk kebijakan legislatif yang akhirnya malah menjadi faktor kriminogen baru. Semoga tidak demikian halnya dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 15 Tahun 2002.

B A B IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Walaupun saat ini sudah ada Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 15 Tahun 2002, namun Pemerintah dan lembaga legislatif belum juga membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, sehingga harus digunakan sarana lain untuk mengatasinya yaitu menggunakan sarana perbankan dan atau lembaga-lembaga keuangan non bank yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang adanya sistem pelaporan transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan, yang tidak wajar, yang jumlahnya besar dan program "know your customer" yang diinstruksikan kepada bank dan lembaga keuangan lainnya, setidaknya-tidaknya diharapkan dapat mencegah arus uang haram atau uang hasil tindak kejahatan masuk atau keluar dalam lalu lintas sistem keuangan (bank) dalam Negara Republik Indonesia.

2. Dapat dipergunakan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 15 Tahun 2002 bagi pelaku korupsi, sepanjang unsur-unsur yang dituduhkan / didakwa belum diatur dalam Undang-Undang Korupsi agar pelaku korupsi dapat segera ditangkap dan diadili. Bagi orang yang melakukan korupsi dan "money laundering" sekaligus, dapat dikenakan tuduhan pidana secara kumulatif, sedang yang hanya melakukan "money laundering" saja seperti mencuci hasil uang kotoranya, dapat dikenakan tuduhan pidana alternatif saja. Dan untuk menjangkau hasil tindak pidana / kejahatan, khususnya dana hasil korupsi yang sudah dicuci (laundering proceeds of crime), sebaiknya diterapkan penafsiran ekstensif dan bukan analogi, juga digunakan beban pembuktian terbalik dalam sidang pengadilan, sehingga dana atau uang-uang haram tersebut dapat disita. Hal yang sama juga berlaku pada benda (asset) yang diperoleh dari kejahatan dapat diambil dan diserahkan pada negara, termasuk pula yang berupa hadiah / pemberian.

3. Walaupun tidak ditulis secara hitam putih tentang Money Laundering, namun dalam (Rencana) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru hal ini juga telah dibicarakan. Ketentuan-ketentuan yang tidak atau belum

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah diatur secara khusus dan tertuang dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 15 Tahun 2002.

B. Rekomendasi

1. Bila ada kasus mengenai “money laundering”, dan belum ada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, maka, maka seyogianya dapat diterapkan peraturan-peraturan yang menunjang, misalnya Peraturan Bank Indonesia, disamping dipertimbangkan pula ketentuan di dalam perundang-undangan khusus seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Korupsi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.
2. Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dan kejahatan “money laundering” secara non yuridis, dapat dilakukan berupa program-program latihan pendidikan, seminar-seminar dan penyuluhan tentang cirri-ciri, karakteristik serta dampaknya kepada para pegawai atau karyawan dalam bank, lembaga-lembaga

keuangan, aparat penegak hukum. Pendek kata semua yang bertalian dengan kedua kejahatan tersebut agar mereka menjadi lebih peka terhadap korupsi, "money laundering" beserta bahaya-bahayanya.

3. Dalam rangka komplementer terhadap Undang-Undang "Money Laundering", maka perlu diciptakan perundang-undangan yang lain yang sejalan dengan Undang-Undang "Money Laundering" seperti undang-undang transfer uang ke luar negeri, undang-undang wajib lapor aset di luar negeri dan undang-undang saling membantu (mutual assistance act) dalam pemberantasan "money laundering" yang diikuti dengan perjanjian bilateral atau multilateral antar negara, untuk menyidik uang hasil kejahatan yang ditransfer ke negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Achta, Zaky. M., Money Laundering Sulit Ditemukan di Indonesia, Suara Pembaharuan, Jakarta, 1993.
- Anwar, Mochamad, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- , Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Alumni, Bandung, 1982.
- Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- , Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- , Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990.
- Assegaf, Rifqi Sjarief, Hanya Hakim yang Bersih dan Kompeten yang Layak Adili Koruptor, Makalah, Jakarta, Juni 2001.
- Atmasasmita, Romli, Prospek Kerjasama Regional atau Internasional Dalam Pemberantasan Money Laundering di Indonesia, Makalah, Jakarta, 1997.
- , Perspektif Pengadilan Korupsi, Makalah, Jakarta, Juni 2001.
- , Money Laundering dan Kebijakan Legislasi, Makalah, Jakarta, Februari 2001.

-----, Sistem Peradilan Pidana, Bina Cipta, Bandung, Januari 1996.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Jakarta, Maret 1999.

Black, Henry Campbell, Black Law Dictionary, Sixth Edition, West Publishing, St. Paul, Minnesota, 1990.

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Keterangan Pemerintah di hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat R.I. mengenai Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta, Juni 2001.

Djumhana, Muhamad, Rahasia Bank, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Hamzah, Andi, Peranan Hukum Nasional Dalam Pemberantasan Money Laundering, BPHN, Jakarta, 1997.

-----, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

-----, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2002.

----- dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.

Harahap, Yahya, Majalah Hukum – Varia Peradilan Nomor 100, Jakarta, Januari 1994.

Harkrisnowo, Harkristuti, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Makalah, Jakarta, Juli 2001.

-----, Pemutihan Uang / Money Laundering Sebagai Bagian Dari White Collar Crime, Makalah, Denpasar, Juli 2001.

Hartono , Soenaryati, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke 20, Alumni, Bandung, 1994.

Ismawati, Sri, Money Laundering Sebagai Salah Satu Bentuk Kejahatan Berdimensi Baru dan Perkembangannya di Indonesia, Makalah, Semarang, 1997.

Irsan , Koesparmono , Peranan Hukum Nasional Dalam Memberantas Money Laundering, Makalah, Jakarta, 1997.

-----, Kejahatan di Bidang Perbankan, Makalah pada Seminar Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan, Bank Indonesia, Jakarta, 1989.

Klitgaard, Robert, Membasmi Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.

Loqman, Loebby, Beberapa Hal tentang Hukum Pidana di Bidang Perekonomian, Jakarta, 1992.

-----, Rencana Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau dari Hukum Acara Pidana, Makalah, Jakarta, Mei 2000.

-----, Tindak Pidana Pencucian Uang, Makalah pada Seminar di Universitas Surabaya, Surabaya, November 2000.

Masassya, Elvyn G., Melawan Praktek Pencucian Uang, Suara Pembaharuan, Juli 2001.

Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, dan Universitas Islam Indonesia, 1980.

Muladi, Kemungkinan Kriminalisasi Money Laundering di Indonesia, Penataran Nasional, Semarang, 1995.

-----, Tindak Pidana Money Laundering dan Permasalahannya, Makalah, Semarang, 1993.

-----, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, UNDIP, Semarang, 1995

-----, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, UNDIP, Semarang, 1997.

Muladi & Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992.

-----, Teori – Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992.

Nasution, Adnan Buyung, Prinsip-Prinsip Umum Pengadilan Korupsi, Makalah, Jakarta, Juni 2001.

Nasution, S. dan Thomas. M. , Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah, Bina Aksara, Jakarta, 1996.

Packer , L. Herbert , The Limits of the Criminal Sanction , Stanford University Press, Stanford California.

Reksodiputro, Mardjono, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.

-----, Hukum Positif Mengenai Kejahatan Ekonomi dan Perkembangannya di Indonesia, Makalah pada Seminar Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan, Jakarta, 1989.

Sahetapy, J. E., Problematisasi Pencucian Uang, Makalah, Surabaya, 1995.

Sahetapy, J.E., Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Simorangkir, O.P., Kamus Perbankan, Bina Aksara, Jakarta, 1989.

Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Sjahdeini, Sutan Remy, Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Reformasi Hukum Perbankan Indonesia, Bahan Kuliah Umum, 1997.

-----, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Makalah, Jakarta, 2000.

-----, Money Laundering, Makalah, Jakarta, Mei 2000.

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.

Susanto, I. S., Kejahatan Korporasi Di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru, Pidato Pengukuhan Guru Besar UNDIP, Semarang, Oktober 1999.

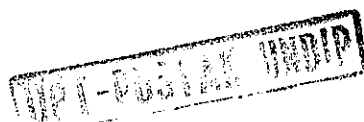
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.

-----, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1990.

Tarliman, Daniel Djoko, Pencucian Uang Dalam Perspektif Rahasia Bank, Makalah, Surabaya, Agustus 1999.

Tamf dan business advisory Indonesia, Kumpulan Komentar RUU Money Laundering, Jakarta, 2002.

Rencana KUHP (Baru) 1991 / 1992, (Revisi), Jakarta, 1993.



Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 15 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 7/Drt/ 1995, LN No. 27 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perbankan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999, LN No. 3844 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, LN No. 66 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Winarno, Heru , Kerjasama Internasional Dalam Memberantas Money Laundering, BPHN, Jakarta, 1999.

Wiyono, R., Tindak Pidana Korupsi di Indonesia , Alumni, Bandung, 1983.